

SKRIPSI

**ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN DAN DAYA SAING SATUAN
WILAYAH PEMBANGUNAN SEBAGAI PUSAT KEGIATAN LOKAL
KABUPATEN CILACAP**



Oleh:
LU'LUUL MA'SUMAH
NIM 15602011015

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI
CILACAP
2020**

SKRIPSI

**ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN DAN DAYA SAING SATUAN
WILAYAH PEMBANGUNAN SEBAGAI PUSAT KEGIATAN LOKAL
KABUPATEN CILACAP**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyusun skripsi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali

Oleh:
LU'LUUL MA'SUMAH
NIM 15602011015

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI
CILACAP
2020**

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN DAN DAYA SAING SATUAN
WILAYAH PEMBANGUNAN SEBAGAI PUSAT KEGIATAN LOKAL
KABUPATEN CILACAP

Oleh :
LU'LUUL MA'SUMAH
NIM 15602011015

Disetujui Untuk

Ujian Sidang Skripsi Pada tanggal:

Pembimbing I



Rasyid Wisnuaji, SE, M.E
NIDN. 0604098803

Pembimbing II



Rahmat Alhakim, S.Pt, M.E
NIDN. 0608078104

PENGESAHAN

Skripsi Saudara
Nama : LU'LUUL MA'SUMAH
NIM : 15602011015
Judul : Analisis Potensi Pengembangan dan Daya Saing
Satuan Wilayah Pembangunan sebagai Pusat
Kegiatan Lokal Kabupaten Cilacap

Telah disidang Skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap pada hari / tanggal :

Jum'at, 08 Januari 2021

Dan dapat diterima sebagai pemenuhan tugas akhir mahasiswa Program Strata I (S.1) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi pada Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap.

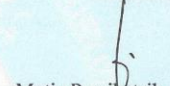
Cilacap, 08 Januari 2021

Dewan Sidang


Ketua


M. Kijal Pamungkas, M.Ec.Dev
NIDN. 0609038403

Sekretaris


Mutia Pamikatsih, M.Esy
NIDN. 0619129101

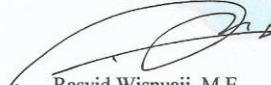
Penguji 1


M. Kijal Pamungkas, M.Ec.Dev
NIDN. 0609038403

Penguji 2


Dina Prasetyaningrum, M.M
NIDN. 0619129101

Pembimbing


Rasyid Wisnuaji, M.E
NIDN. 0604098803

Ass. Pembimbing


Rahmat Alhakim, M.E
NIDN. 0608078104

Mengetahui,
Dekan Ekonomi

Drs. H. Suyono
NIDN.-



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lu'luulMa'sumah
Nim : 15602011015
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya peroleh terkait dengan skripsi ini.

Cilacap, 20 November 2020

Yang membuat pernyataan



Lu'luulMa'sumah
NIM. 15602011015

SURAT KETERANGAN

Menerangkan Bahwa:

Judul :

**ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN DAN DAYA SAING SATUAN
WILAYAH PEMBANGUNAN SEBAGAI PUSAT KEGIATAN LOKAL
KABUPATEN CILACAP**

Jenis Karya Tulis : Skripsi



Nama Penulis : LU'LUUL MA'SUMAH

No. Identitas : 156020110\5

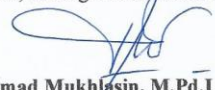
Fakultas : EKONOMI

Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN

Telah melakukan check plagiasi dengan menggunakan "Plagiarism Detector" pada naskah sebagaimana judul diatas dengan pelaksanaan dan hasil sebagai berikut:

Ke	Tanggal	Hasil	Paraf
I	23 Desember 2020	<i>Plagiarism</i> : 34 %	
		<i>Original</i> : 60 %	
		<i>Referenced</i> : 6 %	
II	28 Desember 2020	<i>Plagiarism</i> : 23 %	
		<i>Original</i> : 60 %	
		<i>Referenced</i> : 17 %	
III		<i>Plagiarism</i> : %	
		<i>Original</i> : %	
		<i>Referenced</i> : %	

SSDI; Bidang Literasi Data Digital


Ahmad Mukhlisin, M.Pd.I
NIDN. 2111098601

MOTTO

“Bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tapi Bersyukurlah maka kita akan bahagia”

“Berbeda itu tidak salah, dan Mencintai ketidaksempurnaan itu baik”

Lulu

“Loving yourself isn't vanity, it's sanity”

Katrina Mayer

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Potensi Pengembangan dan Daya Saing Satuan Wilayah Pembangunan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Cilacap” dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. KH. Nasrulloh, M.H selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap.
2. Bapak Drs. H. Suyono selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis.
3. Bapak M. Rijal Pamungkas, M.Ec., Dev selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan pengarahan yang tak terbatas dari awal hingga akhir studi.
4. Bapak Rasyid Wisnuaji, SE, M.E selaku dosen pembimbing I dan Bapak Rahmat Al Hakim, S.Pt., M.E selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan hingga tersusunnya skripsi ini.
5. Para dosen Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan sehingga dapat digunakan dalam penyusunan skripsi serta untuk bekal hidup di kehidupan mendatang.
6. Bapakku tersayang H. Mukharor Abdul Jabar (Alm.) dan Ibu tercinta Siti Sa'diyah yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil.
7. Bapak KH. Mufroil Abdul Jabar yang telah memberikan bantuan dan dukungan secara moril maupun materil.
8. Kakak dan adik-adikku tercinta yang telah menjadi penyemangat studiku.

9. Sahabat karibku Kurniatus Sholihah yang selalu ada saat suka maupun duka dan telah memberikan dukungan selama pengerjaan skripsi ini dari awal hingga akhir.
10. Bani Solikhatun, Zidni Nuron A'la dan Daryono yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama proses belajar di Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali.
11. Semua teman-teman seperjuangan angkatan 2015 dan adik-adik tingkat Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali yang telah memberikan dukungan selama studi.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kesediaan pembaca untuk memberikan kritik dan saran demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pembaca seandainya terdapat kesalahan-kesalahan di dalam skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Cilacap, 20 November 2020

Penulis

RINGKASAN

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui potensi pengembangan dan daya saing Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kabupaten Cilacap yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah terkait pemerataan pembangunan wilayah. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder *time series* yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB Per Kapita masing-masing Kecamatan di Kabupaten Cilacap dan PDRB Kabupaten Cilacap Tahun 2014 – 2018. Sedangkan Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis Tipologi Klassen, analisis *Location Quotient*, dan analisis *Dynamic Location Quotient*.

Hasil tipologi kelas menunjukkan bahwa terdapat tiga daerah di Kabupaten Cilacap yang terklasifikasi sebagai daerah yang cepat maju dan berkembang. Ketiga daerah tersebut yaitu Kecamatan Patimuan, Kecamatan Maos, dan Kecamatan Adipala. Kemudian dari hasil perbandingan analisis *Location Quotient* dan analisis *Dynamic Location Quotient*, diketahui bahwa masing – masing Kecamatan di Kabupaten Cilacap memiliki daya saing sektoral atau karakteristik yang berbeda – beda. Dimana setiap Kecamatan memiliki daya saing berupa sektor unggulan, sektor andalan, sektor prospektif, bahkan sektor tertinggal.

Selain menjadikan kecamatan-kecamatan yang teridentifikasi sebagai daerah maju dan cepat tumbuh sebagai prioritas pembangunan atau sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pemerintah Kabupaten Cilacap juga harus meningkatkan pembangunan terhadap Kecamatan lain sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh setiap kecamatan. Sehingga nantinya dapat tercipta suatu pembangunan ekonomi sub regional secara menyeluruh dan merata.

Kata kunci: PKL, Tipologi Klassen, analisis *Location Quotient*, analisis *Dynamic Location Quotient*, Kebijakan pemerintah.

SUMMARY

This study aims to determine the potential for development and competitiveness of the Regional Development Unit (SWP) as the Local Activity Center (PKL) of Cilacap Regency as information and consideration in local government policy making related to equitable regional development. This study uses secondary time series data, namely Gross Regional Domestic Product (GRDP) and PDRB Per Capita of each District in Cilacap Regency and Cilacap Regency in 2014-2018. The analytical tools used in this study are Klassen Typology analysis, Location Quotient analysis, and Dynamic Location Quotient analysis.

Klassen typology results show that there are three areas in Cilacap Regency that are classified as fast-developed and rapidly developing areas with a GRDP per capita value that is greater than other sub-districts. The three areas are Patimuan District, Maos District, and Adipala District. Then from the comparison of the Location Quotient analysis and Dynamic Location Quotient analysis, it is known that each District in Cilacap Regency has different sectoral competitiveness. Where each district has competitiveness in the form of superior sectors, mainstay sectors, prospective sectors, even underdeveloped sectors. It is hoped that the Cilacap Regency Government can adopt a policy as an effort to broaden sub-regional economic development as a whole and evenly.

In addition to making identified districts as developed and fast growing areas as development priorities or as Centers of Local Activities (PKL), the Cilacap district government must also increase development of other su-districts according to the characteristics of each sub-district. So that in the future there can be created a sub-regional economic development as a whole and evenly.

Keywords: *PKL, Klassen typology, Location Quotient analysis, Dynamic Location Quotient analysis, Government policy*

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
RINGKASAN	ix
SUMMARY.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	
1. Manfaat Praktis	9
2. Manfaat Teoritis	9
II. TELAAH PUSTAKA DAN RUMUSAN MODEL PENELITIAN	
A. Tinjauan Pustaka	11
B. Perumusan Model Penelitian.....	22
C. Penelitian Terdahulu	23
D. Kerangka Berfikir.....	26
III. METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	
1. Lokasi dan waktu penelitian.....	30
2. Jenis dan sumber data.....	30
3. Teknik pengumpulan data	30
B. Definisi Konseptual Dan Operasi Variabel.....	31
C. Teknik Analisis Data	
1. Analisis tipologi kelasn	33
2. Analisis <i>location quotient</i> (LQ) dan Analisis <i>dynamic location quotient</i>	35
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1.1	Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.....	3
Tabel 1.2	Wilayah Administratif Menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT, RW Per Kecamatan	4
Tabel 3.1	Klasifikasi Tipologi Daerah	35
Tabel 4.1	Ketinggian Wilayah dari Permukaan Laut Per Kecamatan....	40
Tabel 4.2	Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Cilacap	42
Tabel 4.3	Wilayah Administratif Menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT, RW dan Luas Wilayah	42
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Kabupaten Cilacap Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018.....	45
Tabel 4.5	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Cilacap Tahun 2018	46
Tabel 4.6	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cilacap Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Non-Migas Tahun 2014 - 2018	47
Tabel 4.7	Kontribusi Sektoral dalam Struktur Ekonomi Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2018	48
Tabel 4.8	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Cilacap Tahun 2015 - 2018.....	49
Tabel 4.9	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita dan Klasifikasi Tipologi Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2014 - 2018	53
Tabel 4.10	Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Dayeuluhur Menurut Daya Saing Tahun 2014 - 2018	55
Tabel 4.11	Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Wanareja Menurut Daya Saing Tahun 2014 - 2018.....	56

Tabel 4.12	Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Majenang Menurut Daya Saing Tahun 2014 - 2018.....	58
Tabel 4.13	Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Cimanggu Menurut Daya Saing Tahun 2014 - 2018.....	59
Tabel 4.14	Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Karangpucung Menurut Daya Saing Tahun 2014 - 2018.....	60
Tabel 4.15	Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Cipari Menurut Daya Saing Tahun 2014 - 2018.....	61
Tabel 4.16	Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Sidareja Menurut Daya Saing Tahun 2014 - 2018.....	62
Tabel 4.17	Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Kedungreja Menurut Daya Saing Tahun 2014 - 2018.....	63
Tabel 4.18	Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Patimuan Menurut Daya Saing Tahun 2014 - 2018.....	64
Tabel 4.19	Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Gandrungmangu Menurut Daya Saing Tahun 2014 - 2018.....	66
Tabel 4.20	Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Bantarsari Menurut Daya Saing Tahun 2014 - 2018.....	67
Tabel 4.21	Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Kawunganten Menurut Daya Saing Tahun 2014 - 2018.....	68
Tabel 4.22	Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Kampung Laut Menurut Daya Saing Tahun 2014 - 2018.....	69
Tabel 4.23	Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Jeruklegi Menurut Daya Saing Tahun 2014 - 2018.....	70
Tabel 4.24	Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Kesugihan Menurut Daya Saing Tahun 2014 - 2018.....	71
Tabel 4.25	Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Adipala Menurut Daya Saing Tahun 2014 - 2018.....	73
Tabel 4.26	Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Maos Menurut Daya Saing Tahun 2014 - 2018.....	74

Tabel 4.27	Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Sampang Menurut Daya Saing Tahun 2014 - 2018.....	75
Tabel 4.28	Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Kroya Menurut Daya Saing Tahun 2014 - 2018.....	76
Tabel 4.29	Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Binangun Menurut Daya Saing Tahun 2014 - 2018.....	78
Tabel 4.30	Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Nusawungu Menurut Daya Saing Tahun 2014 - 2018.....	79
Tabel 4.31	Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Cilacap Selatan Menurut Daya Saing Tahun 2014 - 2018.....	80
Tabel 4.32	Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Cilacap Tengah Menurut Daya Saing Tahun 2014 - 2018.....	81
Tabel 4.33	Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Cilacap Utara Menurut Daya Saing Tahun 2014 - 2018.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	29
Gambar 4.1	Peta Kabupaten Cilacap.....	40
Gambar 4.2	Hasil Tipologi Daerah	84

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Istilah
BPS	: Badan Pusat Statistik
BAPPELITBANGDA	: Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
DISKOMINFO	: Dinas Komunikasi dan Informatika
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PDRN	: Produk Domestik Regional Netto
ADHB	: Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK	: Atas Dasar Harga Konstan
ISIC	: <i>International Standard Industrial Classification of All Economic Activities</i>
UU	: Undang – Undang
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
PKL	: Pusat Kegiatan Lokal
SWP	: Satuan Wilayah Pembangunan
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga

KK	: Kepala Keluarga
LQ	: <i>Location Quotient</i>
DLQ	: <i>Dynamic Location Quotient</i>

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 2 Produk Domestik Regional Bruto Tingkat Kecamatan Non-Migas Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2018
- Lampiran 3 PDRB Per Kapita Tingkat Kecamatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2018
- Lampiran 4 Produk Domestik Regional Bruto Tingkat Kecamatan Non-Migas Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Cilacap Tahun 2014-2018
- Lampiran 5 Penilaian Tipologi Daerah Dengan Analisis Tipologi Klassen
- Lampiran 6 Perhitungan Analisis *Location Quotient* Sektoral Kecamatan
- Lampiran 7 Perhitungan Analisis *Dynamic Location Quotient* Sektoral Kecamatan
- Lampiran 8 Sektor Unggulan, Sektor Andalan, Sektor Prospektif, Sektor Tertinggal Menurut Kecamatan di Kabupaten Cilacap

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat¹. Namun pada umumnya di negara berkembang seperti di Indonesia masih terdapat sebuah dualisme regional, artinya ketidakseimbangan tingkat pembangunan antardaerah dalam suatu negara tersebut. Sehingga diperlukan suatu strategi pembangunan regional yang sesuai dengan karakter, kapasitas dan keunggulan masing-masing wilayah agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan antar daerah yang menghambat kemajuan pembangunan ekonominya.

Untuk itu, pemerintah pusat menetapkan sebuah Undang-undang dalam upaya pemerataan pembangunan yaitu Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 terkait tentang Pemerintah Daerah; Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan ditetapkannya Undang - undang tersebut maka akan terciptanya suatu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang diharapkan dapat mendorong adanya desentralisasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

¹Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan Edisi Kedua*, (Jakarta: KENCANA, 2006) hal 3

Desentralisasi ini menunjukkan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dirinya sendiri secara otonom.

Pemberian otonomi daerah tercermin di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Kebijakan baru ini dapat menjadi peluang dan tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut, pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, serta peran aktif masyarakat dalam mengoptimalkan pendayagunaan potensi daerah akan semakin meningkat sehingga akan berkurangnya suatu ketimpangan antar daerah.

Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terletak dipulau Jawa, letaknya diapit oleh dua provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Luas wilayah Jawa Tengah tercatat sebesar 3,25 juta hektar. Secara administrasi Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Secara rinci dapat kita lihat pada tabel 1.1 di bawah ini:

**Tabel 1.1 Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018**

No.	Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Persentase (%)
Kabupaten			
1.	Cilacap	2.124,47	6,48
2.	Banyumas	1.335,30	4,07
3.	Purbalingga	677,55	2,07
4.	Banjarnegara	1.023,73	3,12
5.	Kebumen	1.211,74	3,69
6.	Purworejo	1.091,49	3,33
7.	Wonosobo	981,41	2,99
8.	Magelang	1.102,93	3,36
9.	Boyolali	1.008,45	3,07
10.	Klaten	658,12	2,01
11.	Sukoharjo	489,12	1,49
12.	Wonogiri	1.793,67	5,47
13.	Karanganyar	775,44	2,36
14.	Sragen	941,54	2,87
15.	Grobogan	2.013,86	6,14
16.	Blora	1.804,59	5,50
17.	Rembang	887,13	2,70
18.	Pati	1.489,19	4,54
19.	Kudus	425,15	1,30
20.	Jepara	1.059,25	3,23
21.	Demak	900,12	2,74
22.	Semarang	950,21	2,90
23.	Temanggung	837,71	2,55
24.	Kendal	1.118,13	3,41
25.	Batang	788,65	2,40
26.	Pekalongan	873,00	2,55
27.	Pemalang	1.118,13	3,41
28.	Tegal	873,71	2,67
29.	Brebes	1.902,37	5,80
Kota			
1.	Magelang	16,06	0,05
2.	Surakarta	46,01	0,14
3.	Salatiga	57,36	0,17
4.	Semarang	373,78	1,14
5.	Pekalongan	45,25	0,14
6.	Tegal	39,68	0,12
Jawa Tengah		32,800,69	100

Sumber : BPS, Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2019

Kabupaten Cilacap yang merupakan salah satu kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayahnya sekitar 6,48% dariluas Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap tentu bukan daerah tanpa potensi.

Topografi wilayah yang beragam berupa kesatuan daerah pantai, hutan, dataran rendah, serta dataran perbukitan yang tentu saja menyediakan kekayaan sumber daya alam. Dimana secara geografis Kabupaten Cilacap berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat dan merupakan pintu gerbang internasional pantai selatan Jawa dengan pelabuhan lautnya sehingga Kabupaten Cilacap memiliki potensi dan prospek perkembangan yang besar.

Secara administratif Kabupaten Cilacap terbagi menjadi 24 Kecamatan; 269 Desa; 15 Kelurahan; 2.319 Rukun Warga (RW) dan 10.463 Rukun Tetangga (RT). Secara rinci dapat kita lihat pada tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2 Wilayah Administratif Menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT, RW Kabupaten Cilacap

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	RT	RW	Luas Wilayah (Ha)
1.	Dayeuluhur	14	-	386	118	18.506,10
2.	Wanareja	16	-	665	182	18.973,31
3.	Majenang	17	-	785	167	13.856,19
4.	Cimanggu	15	-	446	107	16.744
5.	Karangpucung	14	-	417	107	11.512,43
6.	Cipari	11	-	363	80	12.148
7.	Sidareja	10	-	293	54	5.495,48
8.	Kedungreja	11	-	485	93	7.143
9.	Patimuan	7	-	322	79	7.530
10.	Gandrungmangu	14	-	583	88	14.319,40
11.	Bantarsari	8	-	410	67	9.554
12.	Kawunganten	12	-	468	80	11.743
13.	Kampong Laut	4	-	128	39	14.598
14.	Jeruklegi	13	-	432	83	9.679,46
15.	Kesugihan	16	-	690	156	8.230,62
16.	Adipala	16	-	515	118	6.118,68
17.	Maos	10	-	263	66	2.804,15
18.	Sampang	10	-	228	72	2.730,13
19.	Kroya	17	-	550	111	5.883,39
20.	Binangun	17	-	363	110	5.142,43
21.	Nusawungu	17	-	452	119	6.126,44
22.	Cilacap Selatan	-	5	447	73	910,61
23.	Cilacap Tengah	-	5	421	80	2.217,20
24.	Cilcapa Utara	-	5	351	70	1.883,83
Jumlah		269	15	10.463	2.319	213.850

Sumber : BPS, Cilacap Dalam Angka 2019, diolah

Berdasarkan hal tersebut di atas, tentu saja menjadi sebuah tantangan besar bagi pemerintah daerah Kabupaten Cilacap terkait pembangunan dan pertumbuhan daerahnya secara merata. Namun nyatanya, wilayah yang terlalu luas dengan jumlah penduduk yang banyak menyebabkan rentang kendali pemerintahan menjadi kurang optimal. Beberapa infrastruktur bangunan dan kelengkapan pelayanan masyarakat juga mengalami ketimpangan antar wilayah. Luasnya wilayah Kabupaten Cilacap kemudian juga memunculkan permasalahan jarak tempuh bagi warga yang tinggal di wilayah pinggiran untuk menuju ke pusat pemerintahan.

Oleh karenanya, salah satu isu yang menarik paska runtuhnya orde baru pada tahun 1998 adalah maraknya pemekaran daerah yang terjadi pada tingkatan provinsi maupun kabupaten/kota. Pemekaran daerah kemudian dianggap sebagai suatu hal yang lazim dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Disamping itu, pemekaran daerah sejalan dengan fungsi substantif dari keberadaan pemerintahan, yakni untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga pemerintah perlu semakin dekat dengan masyarakatnya sehingga dapat memberikan respon secara cepat terhadap kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Untuk itu, sebagai salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap pun telah mewacanakan adanya pemekaran daerah menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Cilacap Barat yang meliputi 10 kecamatan (Dayeuhluhur, Wanareja,

Majenang, Cimanggu, Karangpucung, Gandrungmangu, Sidareja, Kedungreja, Patimuan, dan Cipari). Pemekaran daerah ini diwacanakan dengan tujuan sebagai sarana untuk pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan serta peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Wacana pemekaran daerah Cilacap Barat telah bergulir sejak tahun 2006 silam. Artinya, wacana pemekaran Cilacap Barat telah berkembang selama lebih dari 10 tahun. Selama kurun waktu tersebut, berbagai langkah dan prosedur telah ditempuh oleh pihak-pihak terkait yang menginginkan terwujudnya pemekaran Cilacap Barat. Lamanya proses pemekaran daerah tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari internal maupun eksternal. Selain itu, selama proses pemekaran bergulir, pastinya juga terjadi banyak dinamika dan perubahan pada masyarakat, baik dalam segi sosial maupun politik.

Dengan adanya suatu wacana pemekaran daerah di Kabupaten Cilacap yang bertujuan sebagai upaya pemerataan pembangunan dalam mengurangi tingkat ketimpangan antar daerah, salah satu aspek penting yang harus diperhatikan yaitu mengkaji dan menganalisis karakter pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama dalam ruang masing-masing kecamatan di Kabupaten Cilacap. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Perda Kabupaten Cilacap Nomor 9 pasal 5 dan pasal 6 (2011) menetapkan kebijakan tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Cilacap tahun 2011-2031 dalam hal ini

tentang rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem perkotaan yaitu PKL (Pusat Kegiatan Lokal) yang meliputi kawasan perkotaan Kroya dan kawasan perkotaan Majenang. PKL berfungsi sebagai pusat pelayanan umum, pusat perdagangan dan jasa maupun koleksi dan distribusi hasil – hasil bumi dari kecamatan – kecamatan yang menjadi wilayah pengaruhnya. Untuk mendukung fungsi tersebut maka fasilitas yang harus ada adalah fasilitas pelayanan umum serta perdagangan dan jasa skala kecamatan dengan ditunjang oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) direncanakan memiliki skala pelayanan satu Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) yang terdiri dari gabungan beberapa kecamatan yang ada di dalamnya.

Sebagai salah satu Kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap pastinya memiliki berbagai macam potensi di setiap wilayah dengan adanya perbedaan lokasi geografisnya. Atas dasar uraian tersebut di atas, dengan adanya berbagai upaya pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Cilacap , studi tentang pengamatan terhadap pola pertumbuhan di masing-masing wilayah di Kabupaten Cilacap merupakan suatu kebutuhan bagi perencanaan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Untuk itu, penulis akan mengidentifikasi pola pertumbuhan dan daya saing sektoralnya dalam Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) yang nantinya dapat diketahui daerah mana yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “**Analisis Potensi**

Pengembangan dan Daya Saing Satuan Wilayah Pembangunan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Cilacap” diharapkan dapat teridentifikasi pola pertumbuhan serta potensi pengembangan dalam SWP sebagai wilayah PKL baru dalam rencana sistem perkotaan Kabupaten Cilacap yang saat ini hanya meliputi 2 kawasan perkotaan. Dengan adanya wilayah PKL baru maka diharapkan nantinya wilayah dalam SWP dapat saling mendorong pertumbuhan ekonomi dan secara tidak langsung akan menciptakan pembangunan yang merata dan meningkatnya kesejahteraan masyarakatnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dikemukakan beberapa perumusan masalah sebagai berikut:

1. Daerah manakah dalam Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) di Kabupaten Cilacap yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal berdasarkan tipologi daerahnya?
2. Bagaimana daya saing sektoral antar kecamatan di Kabupaten Cilacap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui daerah manakah dalam Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) di Kabupaten Cilacap yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal berdasarkan tipologi daerahnya.
2. Untuk mengetahui bagaimana daya saing sektoral antar kecamatan di Kabupaten Cilacap.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dimana hanya terfokus atau terbatas pada kajian data selama rentang periode lima tahun, yaitu tahun 2014 – 2018. Kajian tersebut terkait analisis tipologi wilayah/daerah dan daya saing sektoral dalam perekonomian antar wilayah/daerah pada tahun 2018.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberi manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat yang diberikan yaitu:

1. Manfaat teoritis

Menambah wawasan serta pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu ekonomi tentang Ekonomi Regional yaitu mengenai kebijakan pembangunan yang digunakan untuk memecahkan masalah ekonomi serta meningkatkan perekonomian Kabupaten Cilacap.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai masukan dan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pendapatan dan pengembangan potensi daerahnya.

- b. Sebagai sumber informasi untuk para peneliti lain terutama yang tertarik dalam bidang ekonomi regional dengan ruang lingkup dan kajian yang berbeda.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN MODEL PENELITIAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Teori Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai salah satu upaya atau kebijakan yang dapat mendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat, adanya pemerataan pendapatan, terciptanya suatu lapangan kerja, berkembangnya suatu teknologi yang akan merubah suatu kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier serta nantinya secara otomatis akan dapat meningkatkan suatu hubungan ekonomi regional².

Pembangunan juga merupakan suatu bentuk perubahan yang positif, dimana didalamnya mencakup suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang terdapat di suatu daerah. Hasil dari pembangunan tersebut dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan penduduk serta pendapatannya. Ada tiga nilai pokok dalam keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu³.

1. Dapat berkembangnya kemampuan suatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*).
2. Rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia yang terus meningkat.

²Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan Edisi Kedua*, (Jakarta : KENCANA, 2006) hal 3

³Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2016) hal 11

3. Meningkatnya kemauan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) sesuatu yang merupakan haknya.

2. Pembangunan Ekonomi Regional

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana masyarakat bersama pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya secara efektif dan efisien serta membentuk hubungan antara pemerintah daerah dengan swasta guna menciptakan suatu lapangan kerja yang nantinya diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut secara merata⁴. Tolak ukur berhasil tidaknya suatu pembangunan dapat dilihat dari berbagai macam cara salah satunya yaitu dengan pendekatan ekonomi yang didasarkan dari aspek pendapatan.

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu bentuk keberhasilan dari suatu pembangunan di dalam suatu daerah dapat dilihat dari kemajuan ekonomi daerah tersebut. Dimana pertumbuhan ekonomi merupakan suatu bentuk perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan meningkatnya aktivitas produksi barang dan jasa dalam masyarakat. Hal tersebut terjadi karena adanya suatu faktor-faktor produksi, yaitu: (1) investasi, dengan adanya investasi pastinya akan menambah jumlah barang modal; (2) penduduk, dimana akibat dari suatu perkembangan penduduk pastinya akan menambah jumlah tenaga

⁴Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2016) hal 374

kerja; (3) adanya teknologi yang semakin berkembang; dan (4) pengalaman kerja dan pendidikan menambah ketrampilan⁵.

4. Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu bentuk dari pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu dengan adanya kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi⁶. Di dalam pertumbuhan ekonomi wilayah terdapat suatu teori pertumbuhan wilayah yaitu menganalisis bagaimana pertumbuhan terjadi dalam suatu lingkungan spasial yang menggunakan wilayah sebagai kategori dasar. Dimana suatu wilayah sebagai suatu sistem ekonomi terbuka yang berhubungan dengan wilayah-wilayah lain melalui arus perpindahan faktor produksi dan pertukaran komoditas.

5. Pendapatan Regional

Hasil pembangunan ekonomi yang dicapai dapat memberikan informasi serta memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi maupun perencanaan pembangunan. Penyajian angka-angka pendapatan regional merupakan alat untuk mengukur seberapa besar keberhasilan pembangunan tersebut khususnya dalam bidang ekonomi. Pendapatan regional adalah nilai produksi barang dan jasa yang ada dalam perekonomian di suatu wilayah selama satu tahun.

⁵Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan Edisi Kedua*, (Jakarta : KENCANA, 2006) hal 9

⁶Drs. Robinson Tarigan, M.R.P, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*, (Jakarta : BUMI AKSARA, 2015) hal 46

Beberapa istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan pendapatan regional, diantaranya adalah:

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu yang timbul dari seluruh sektor perekonomian. Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai produksi (*output*) dikurangi dengan biaya antara (*intermediate cost*). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita menjadi salah satu indikator kemakmuran penduduk suatu daerah yang ditampilkan secara berkala dan digunakan untuk mengetahui perkembangan tingkat kemakmuran yang terjadi di daerah tersebut. Sajian hasil perhitungan PDRB dibagi menjadi dua bentuk yaitu atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasar harga konstan tidak dipengaruhi oleh inflasi sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku sangat dipengaruhi oleh inflasi atau fluktuasi harga yang ada. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dari tiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk menghitung pergeseran struktur ekonomi. Semakin tinggi nilai PDRB perkapita maka semakin tinggi pula kekayaan daerah tersebut.

Sektor-sektor perekonomian berdasarkan lapangan usaha yang tercakup dalam PDRB, yaitu:

1) Pertanian.

- 2) Pertambangan dan Penggalian.
 - 3) Industri Pengolahan.
 - 4) Listrik, Gas dan Air Bersih.
 - 5) Bangunan/Konstruksi.
 - 6) Perdagangan, Hotel dan Restoran.
 - 7) Pengangkutan dan Komunikasi.
 - 8) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan.
 - 9) Jasa-jasa.
- b. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas Dasar Harga Pasar
PDRN adalah hasil pengurangan PDRB dengan penyusutan. Penyusutan yang dimaksud di sini adalah pengurangan nilai barang-barang modal (mesin-mesin, peralatan, kendaraan dan lain-lainnya) yang terjadi akibat terpakainya barang modal tersebut dalam proses produksi.
- c. Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas Dasar Biaya Faktor
Produk Regional Netto atas Dasar Biaya Faktor Produksi didapatkan dari pajak tidak langsung netto yang dikeluarkan dari PDRN atas Dasar Harga Pasar. Pajak tidak langsung meliputi pajak bea ekspor, penjualan, bea cukai, dan pajak lain-lain, kecuali pajak pendapatan dan pajak perseroan⁷.

⁷Achmad Fauzi, Tesis: “*Analisis Spasial Dan Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Di Wilayah Kabupaten Cilacap*” (Purwokerto: UNSOED, 2005), Hal.19.

Perhitungan pendapatan regional metode langsung dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu⁸:

a. Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Pendekatan pengeluaran adalah pendapatan regional yang ditentukan dengan menjumlahkan seluruh nilai guna akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu wilayah. Seluruh penyediaan barang dan jasa dipergunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, perubahan stok dan ekspor netto (ekspor-impor), pembentukan modal tetap bruto (investasi).

b. Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Pendapatan regional didasarkan atas pendekatan produksi yang dilakukan dengan cara nilai produksi yang tercipta oleh tiap-tiap sektor produksi dalam perekonomian dijumlahkan seluruhnya. Oleh karena itu, untuk menghitung pendapatan regional yang didasarkan oleh pendekatan produksi, yang harus dilakukan pertama adalah menentukan nilai produksi yang diciptakan oleh tiap-tiap sektor di atas. Pendapatan regional diperoleh dengan cara nilai produksi yang tercipta dari tiap-tiap sektor dijumlahkan.

c. Pendekatan Penerimaan (*Income Approach*)

Pendapatan regional dalam cara ini dapat dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan faktor-faktor produksi dalam

⁸Drs. Robinson Tarigan, M.R.P, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*, (Jakarta : BUMI AKSARA, 2015) hal 24

memproduksi barang dan jasa. Dalam hal ini yang dijumlahkan adalah: upah dan gaji, penyusutan, surplus usaha, dan pajak tidak langsung netto.

6. Perencanaan Pembangunan Wilayah

Perencanaan pembangunan wilayah atau regional merupakan unsur-unsur interaksi dengan entitas ekonomi yang beragam. Untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi suatu wilayah didasarkan melalui ekonomi regional, yaitu dengan cara mengevaluasi secara kolektif dan komparatif terhadap kesempatan dan kondisi ekonomi skala wilayah.

Perencanaan pembangunan wilayah dapat dianggap sebagai perencanaan perbaikan dalam penggunaan sumberdaya-sumberdaya yang tersedia dimasyarakat dalam suatu wilayah serta untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan sumberdaya-sumber daya dengan tanggung jawab. Selain itu dengan menciptakan suatu kebijakan pembangunan wilayah merupakan salah satu bentuk tindakan atau keputusan yang harus diambil oleh pemerintah atau pengambil keputusan publik yang berwenang dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mendorong kesejahteraan sosial secara menyeluruh sesuai dengan aspirasi dan keinginan yang ada di dalam masyarakat.

7. Teori Lokasi

Masalah lokasi dari setiap kegiatan pembangunan baik secara nasional maupun secara wilayah harus dipertimbangkan dan dipilih dengan tepat agar kegiatan suatu pembangunan dapat berlangsung secara produktif dan

efisien⁹. Landasan utama dari suatu lokasi yaitu terdapat ruang, karena lokasi menggambarkan posisi pada ruang tersebut (dapat ditentukan) berdasarkan bujur dan lintangnya. Namun dalam studi ruang, yang menjadi perhatian bukanlah sekedar kemampuan dalam menentukan posisi atau letak kegiatan pembangunan yang ada dalam satu ruang wilayah, melainkan bagaimana dampak atau keterkaitan antara kegiatan di suatu lokasi dengan kegiatan yang ada pada lokasi lain dengan melihat jarak (dekat atau jauhnya) satu kegiatan dengan kegiatan lain. Teori Lokasi merupakan sebuah ilmu yang menyelidiki tata ruang kegiatan ekonomi. Selain itu, Teori Lokasi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang lokasi secara geografis, serta pengaruhnya terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain¹⁰.

Analisis terkait bagaimana suatu lokasi yang memiliki potensi/daya tarik terhadap batas wilayah pengaruhnya di mana orang masih ingin mendatangi pusat lokasi yang memiliki potensi tersebut, sehingga hal ini berkaitan dengan besarnya daya tarik pada pusat tersebut dan jarak antara lokasi dengan pusat tersebut. Selain itu, berbagai faktor yang ikut dipertimbangkan dalam menentukan lokasi, antara lain ketersediaan bahan baku, upah buruh, jaminan keamanan, fasilitas penunjang, daya serap pasar lokal, dan aksesibilitas dari tempat produksi ke wilayah pemasaran yang

⁹H. RahardjoAdisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*, (Yogyakarta : GRAHA ILMU, 2005) hal 39

¹⁰Drs. Robinson Tarigan, M.R.P, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*, (Jakarta : BUMI AKSARA, 2015) hal 122

dituju (terutama aksesibilitas pemasaran keluar negeri), stabilitas politik suatu negara, dan kebijakan daerah (peraturan daerah).

8. Teori Tempat Sentral (*Central Place Theory*)

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Walter Cristaller seorang ahli geografi berkebangsaan Jerman pada tahun 1933 yang kemudian diperluas oleh August Losch seorang ahli ekonomi pada tahun 1944. Teori-teori tersebut telah merintis analisis tata ruang yang menekankan pada identifikasi sistem wilayah baik secara fisik ataupun ekonomi yang memiliki pola distribusi kegiatan-kegiatan produksi dan daerah-daerah perkotaan secara hirarkis ¹¹.

Dalam model Christaller menganalisis susunan spasial baik segi mikro yaitu menganalisis mengenai distribusi produksi barang-barang secara individual, dan segi makro menyangkut distribusi aglomerasi. Sedangkan dalam model Losch tidak menganalisis susunan spasial yang overall, tetapi lebih merupakan model-model lokasi spesialisasi spasial di mana tidak perlu semua barang di produksi pada pusat yang lebih unggul.

Teori tempat sentral menjelaskan polageografis dan struktur herarkis pusat-pusat kota atau wilayah-wilayah nodal. Menurut model Christaller, pusat-pusat yang lebih tinggi ordenya melayani pusat-pusat yang lebih rendah ordenya. Sedangkan menurut Losch pusat-pusat yang lebih kecil melayani pusat yang lebih besar. Tetapi model-model tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan, tetapi pembahasan masalah wilayah

¹¹H. RahardjoAdisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*, (Yogyakarta : GRAHA ILMU, 2005) hal 51

nodal terutama mengenai respons nodal yang menunjukkan ciri bahwa pertumbuhan kegiatan di suatu pusat adalah untuk melayani penduduk di daerah belakang (*hinterland*). Karena jika pertumbuhan terjadi di daerah belakang akan mendorong pertumbuhan di pusat perkotaan.

9. Teori Pusat Pertumbuhan dan Pusat Pertumbuhan

Teori pusat pertumbuhan (*growth pole*) dipelopori oleh ahli ekonomi regional berkebangsaan Prancis, Francois Perroux, pada sekitar tahun 1955. Konsep *Growth Pole* menurut Perroux menjelaskan bahwa berdasarkan fakta dasar perkembangan peruangan (spasial), pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat dan juga tidak terjadi secara serentak. Sebaliknya, pertumbuhan terjadi pada titik-titik atau kutub-kutub perkembangan, dengan intensitas yang berubah-ubah. Pertumbuhan itu kemudian menyebar sepanjang saluran-saluran yang beranekaragam terhadap keseluruhan perekonomian.

Inti dari teori pusat pertumbuhan ini adalah dengan adanya satu daerah sentral yang menjadi pusat pertumbuhan dimana akan mendorong pertumbuhan bagi daerah sekitarnya. Dalam skala yang lebih besar, aktivitas pusat pertumbuhan ini akan dapat memacu kinerja perekonomian di suatu wilayah menjadi lebih baik. Ada empat sifat yang menjadi ciri dari pusat pertumbuhan ekonomi. Keempat sifat tersebut adalah sebagai berikut¹².

¹²Drs. Robinson Tarigan, M.R.P, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*, (Jakarta : BUMI AKSARA, 2015) hal 162-163

1. Adanya hubungan intern dari berbagai macam kegiatan

Hubungan internal sangat menentukan dinamika sebuah kota. Ada keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya sehingga apabila ada satu sektor yang tumbuh akan mendorong pertumbuhan sektor lainnya, karena saling terkait. Dengan demikian kehidupan kota menjadi satu irama dengan berbagai komponen kehidupan kota dan menciptakan sinergi untuk saling mendukung terciptanya pertumbuhan.

2. Adanya efek pengganda (*multiplier effect*)

Keberadaan sektor-sektor yang saling terkait dan saling mendukung akan menciptakan efek pengganda. Unsur efek pengganda memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan kota belakangnya. Hal ini terjadi karena peningkatan berbagai sektor di kota pusat pertumbuhan akan membutuhkan berbagai pasokan baik tenaga kerja maupun bahan baku dari kota belakangnya.

3. Adanya konsentrasi geografis

Konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas, selain bisa menciptakan efisiensi di antara sektor-sektor yang saling membutuhkan, juga meningkatkan daya tarik dari kota tersebut.

4. Bersifat mendorong pertumbuhan daerah belakangnya

Selama terdapat hubungan yang harmonis di antara kota sebagai pusat pertumbuhan dengan kota belakangnya maka pertumbuhan kota pusat akan mendorong pertumbuhan kota belakangnya.

10. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Didalam suatu daerah terdapat suatu rencana dalam struktur wilayah yang dimana merupakan suatu tatanan dalam kebijakan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang bertujuan sebagai suatu arahan dalam pembangunan di suatu wilayah dengan cara memanfaatkan ruang wilayah yang berdaya guna, serasi, selaras serta seimbang dan berkelanjutan. Salah satunya yaitu dengan menetapkan suatu wilayah sebagai pusat-pusat kegiatan yang berhirarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan transportasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, Dalam struktur ruang baik Nasional, Provinsi maupun Kabupaten salah satunya dikenal dengan istilah Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Dimana Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan dengan kriteria:

- a. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
- b. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

B. Perumusan Model Penelitian

1. Analisis Tipologi Klassen

Tipologi Klassen merupakan suatu alat analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui klasifikasi tipologi daerah perekonomian masing-masing wilayah di Kabupaten Cilacap dengan tujuan dapat mengidentifikasi posisi

suatu daerah perekonomian masing-masing wilayah kecamatan dengan memperhatikan perekonomian Kabupaten Cilacap sebagai daerah referensi.

2. Analisis *Location Quotient* dan analisis *Dynamic Location Quotient*

Setelah diberlakukannya suatu kebijakan otonomi daerah, dimana setiap daerah memiliki hak untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi bagidaerahnya. Untuk itu alat analisis yang digunakan untuk menentukan potensiperekonomian suatu wilayah adalah LQ (*Location Quotient*) dan DLQ (*Dynamic Location Quotient*).Dimana kedua teknik analisisini akan membandingkan besarnya peranan suatu sektor di suatu daerah terhadap besarnya peranan suatu sektor secara nasional.

C. Penelitian terdahulu

Berikut ini merupakan beberapahasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang kemudian digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam kegiatan penelitian ini.

1. Penelitian tentang “Analisis Penetapan Pusat Pertumbuhan Baru Di Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Tengah Kabupaten Brebes”. Variabel yang digunakan: Rata-rata PDRB antar Wilayah (Kecamatan) Kabupaten Brebes, Jumlah Fasilitas Pelayanan antar Wilayah (Kecamatan) Kabupaten Brebes, Jarak antar Wilayah (Kecamatan) Kabupaten Brebes, Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Brebes, Pendapatan Per Kapita Kabupaten Brebes. Hasil analisis Tipologi Klassen : Terdapat 3 Kecamatan di SWP Tengah Kabupaten Brebes yang termasuk dalam daerah tertinggal yaitu Kecamatan Songgom,

Banjarharjo, dan Larangan, Hasil analisis Interaksi Spasial : Kekuatan interaksi keruangan Kecamatan Jatibarang dan Larangan mempunyai daya tarik bagi masyarakat di SWP Tengah dilihat dari masyarakat di kecamatan lain lebih memilih memanfaatkan fasilitas yang ada di kedua kecamatan tersebut, Hasil analisis Skalogram : Kecamatan dengan jumlah dan jenis fasilitas yang lengkap terdapat di Kecamatan Jatibarang dan Larangan¹³.

2. Penelitian tentang “Analisis Penetapan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru Di Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon Selatan”. Variabel yang digunakan: Jumlah Fasilitas Pelayanan antar Wilayah (Kelurahan) Kecamatan Harjamukti, Jarak antar Wilayah (Kelurahan) Kecamatan Harjamukti, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah tiap Kelurahan, Hasil analisis menunjukkan Kelurahan Kecapi berpotensi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, pemukiman, kesehatan karena kelengkapan fasilitasnya, sedangkan Kelurahan Kalijaga berpotensi sebagai pusat pelayanan pemerintah karena merupakan ibu kota kecamatan, dan pusat pemukiman, dan daerah wisata rohani, Kelurahan harjamukti berpotensi sebagai pusat pelayanan, perdagangan, dan lahan kosongnya berpotensi sebagai lahan peternakan., Kelurahan Larangan berpotensi sebagai pusat pendidikan, kesehatan, pemukiman, dan perdagangan dan jasa, karena jaraknya yang sangat

¹³ Rahmat Andi Yulianto, Skripsi: “Analisis Penetapan Pusat Pertumbuhan Baru Di Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Tengah Kabupaten Brebes” (Semarang: UNDIP, 2015), Hal.VII.

dekat dengan Kelurahan Kecapi, Kelurahan Argasanya berpotensi sebagai pusat pemukiman, lahannya berpotensi untuk lahan perkebunan dan peternakan¹⁴.

3. Penelitian tentang “Analisis Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Interaksi antar Kecamatan Di Kabupaten Pringsewu”. Variabel yang digunakan : Jumlah Fasilitas Pelayanan antar Wilayah (Kecamatan) Kabupaten Pringsewu, Jarak antar Wilayah (Kecamatan) Kabupaten Pringsewu, Jumlah Penduduk antar Wilayah (Kecamatan) Kabupaten Pringsewu, Hasil analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas diperoleh bahwa di Kabupaten Pringsewu terdapat satu pusat pertumbuhan yaitu Kecamatan Pringsewu, Hasil analisis Gravitasi menunjukkan bahwa pada kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan yakni kecamatan Pringsewu yang memiliki interaksi paling kuat adalah Kecamatan Gadingrejo¹⁵.
4. Penelitian tentang “Analisis Penetapan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jombang”. Variabel yang digunakan: Kecamatan Dalam Angka tahun 2012 PDRB atas dasar harga konstan pada tiap kecamatan, PDRB Kabupaten Jombang atas dasar harga konstan tahun 2002 sampai dengan tahun 2011, Hasil analisis Skalogram : Kecamatan yang memiliki jumlah fasilitas terbanyak dan menempati hirarki I adalah

¹⁴ Sasya Danastri, Skripsi: “Analisis Penetapan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru Di Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon Selatan” (Semarang: UNDIP, 2011), Hal.6.

¹⁵ Ade Pratama Poetra, Skripsi: “Analisis Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Interaksi antar Kecamatan Di Kabupaten Pringsewu Analisis Penentuan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Interaksi antar Kecamatan Di Kabupaten Pringsewu” (Bandar Lampung: UNILA, 2016), Hal.2.

kecamatan Jombang, pada RTRW Kabupaten Jombang juga menyebutkan bahwa kecamatan Jombang sebagai kecamatan pusat pertumbuhan utama yang ada di Kabupaten Jombang, Kemudian berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* (LQ) : Sektor unggulan Kabupaten Jombang yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran¹⁶.

5. Penelitian tentang “Analisis Potensi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Cilacap”. Variabel yang digunakan: data sekunder yaitu berupa data times series dengan periode waktu tahun 2008-2012 yang bersumber dari BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS Kabupaten Cilacap dan jurnal serta literatur yang berkaitan dengan penelitian, Metode analisis yang digunakan yaitu Tipologi Klassen, Analisis Location Quotient (LQ), Model Rasio Pertumbuhan (MRP), Analisis Overlay, Analisis Skalogram, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cilacap dan kawasan kerjasamanya adalah Kawasan Barat dengan pusat pertumbuhan ekonomi Kecamatan Majenang, Kawasan Tengah dengan pusat pertumbuhan Kecamatan Gandrungmangu, Kawasan Timur dengan pusat pertumbuhan Kecamatan Kesugihan, untuk pengembangannya perlu dengan meningkatkan investasi guna mengembangkan sektor

¹⁶ Azharia Lathiefunnisa, Skripsi: “Analisis Penetapan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jombang” (Jember: UNEJ, 2013), Hal.VIII.

unggulan yang berdaya saing kompetitif dan komparatif, sehingga menopang Kecamatan Hiterlandnya untuk tumbuh dan berkembang¹⁷.

D. Kerangka berfikir

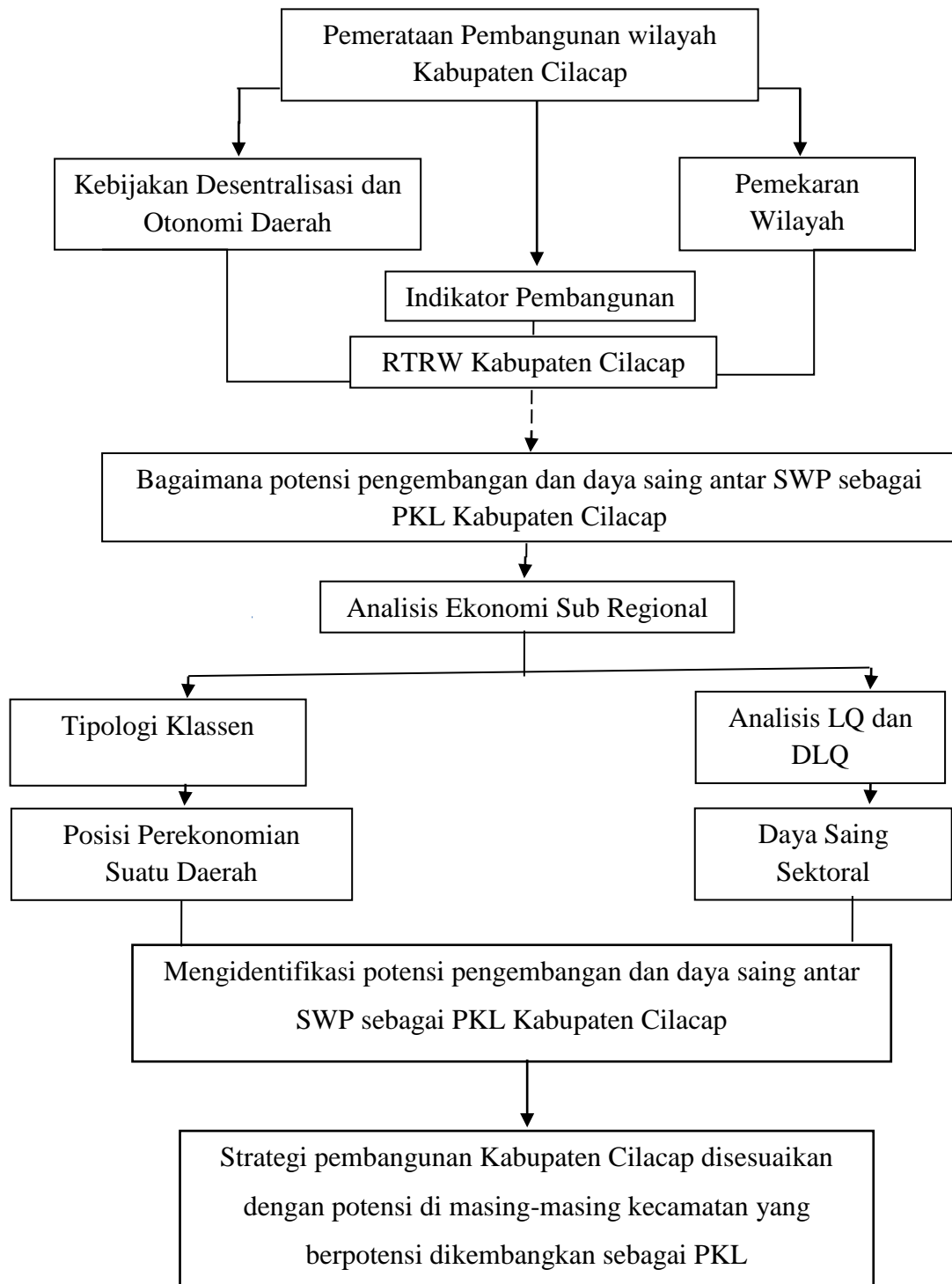
Di dalam suatu proses pembangunan ekonomi terdapat suatu perbedaan potensi ekonomi dan geografi wilayah, hal itulah yang menjadifaktor utama penyebab terjadinya ketimpangan daerah. Selain itu, adanya arus barang dan faktor produksi antar wilayah yang tidak lancar juga menjadi pemicu terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi daerah. Untuk itu menciptakan suatu kebijakan dalam upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi daerah menjadi suatu hal yang sangat penting yang harus diambil oleh perencana pembangunan guna untuk mendorong proses pembangunan daerah.

Faktor-faktor penentu performa ekonomi suatu daerah tidak hanya mencakup kualitas kelembagaan, produktivitas tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia saja tetapi juga mencakup faktor geografi. Dengan merumuskan suatu kebijakan tata ruang wilayah dalam menentukan suatu wilayah sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di dalam SWP Kabupaten Cilacap, maka salah satu langkah penting untuk dilakukan yaitu analisis terhadap pertumbuhan wilayahnya. Untuk memperoleh suatu gambaran detail mengenai perekonomian Kabupaten Cilacap dan mempertajam analisis maka dilakukan regionalisasi analisis ke dalam sub wilayah yang meliputi 24 kecamatan.

¹⁷ Aziz Pratomo, Jurnal: *“Analisis Potensi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Cilacap”* (Semarang: UNES, 2014), Hal.1.

Langkah pertama dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan identifikasi terhadap pola pertumbuhan masing-masing wilayah dalam SWP Kabupaten Cilacap dengan menggunakan alat analisis Tipologi Klassen, *Location Quotient* (LQ), *Dynamic Location Quotien* (DLQ). Dari analisis ini akan diperoleh keadaan atau posisi perekonomian dan daya saing sektoral pada suatu daerah yaitu pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Cilacap.

Sintesis dari seluruh analisis yang telah diuraikan akan bermuara pada satu perumusan alternatif langkah strategis dalam rencana sistem perkotaan dan upaya pelaksanaan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap melalui konsep penetapan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) baru di tiap kecamatan atau dalam SWP Kabupaten Cilacap. Sehingga nantinya diharapkan akan mempersempit kesenjangan antar daerah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cilacap. Secara grafik, alur berpikir dalam penelitian ini dapat diilustrasikan dalam gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.2 Kerangka Berfikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Lokasi dan waktu penelitian

Objek penelitian adalah Kabupaten Cilacap. Waktu penelitian selama 6 bulan yaitu dari bulan Oktober 2020 – Januari 2021, terdiri dari pengajuan judul, penyusunan proposal skripsi, seminar proposal skripsi, penelitian, dan ujian skripsi.

2. Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder, dengan menggunakan data *time series* yaitu periode 2014 – 2018 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), BAPPELITBANGDA, BPN Kabupaten Cilacap. Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. PDRB Kecamatan dan Kabupaten Cilacap periode 2014-2018
- b. PDRB Per kapita Kecamatan periode 2014 – 2018.
- c. Jumlah penduduk Kabupaten Cilacap menurut kecamatan.
- d. Data sekunder lainnya yang masih ada kaitannya dengan tujuan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui studi pustaka langsung ke Badan Pusat Statistik, BAPPELITBANGDA, BPN,

DISKOMINFO Kabupaten Cilacap dan data dikumpulkan melalui akses internet.

B. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Produk Domestik Regional Bruto

a. Definisi Konseptual

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diartikan sebagai nilai tambah bruto dari keseluruhan barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah domestik di suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Perhitungan PDRB dilakukan dalam periode satu tahun atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan total nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada saat tahun perhitungan. Adapun PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) adalah akumulasi nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan mengacu harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

b. Definisi Operasional

Dalam konteks penelitian, PDRB yang dimaksud adalah akumulasi nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi masing-masing kecamatan di Kabupaten Cilacap non migas atas dasar harga konstan berdasarkan tahun 2010 dalam satuan rupiah yang terdiri dari 9 sektor ekonomi. Perhitungan PDRB tingkat

kecamatan berdasarkan metode alokatif yaitu perbandingan antara jumlah penduduk menurut lapangan usaha pada masing-masing kecamatan dengan PDRB Kabupaten Cilacap dalam satuan miliar rupiah.

2. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

a. Definisi Konseptual

PDRB per kapita merupakan rasio PDRB terhadap jumlah penduduk suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Sejalan dengan konsep perhitungan PDRB, PDRB per kapita juga dapat berupa perhitungan atas dasar harga berlaku maupun konstan.

b. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, PDRB per kapita yang digunakan sebagai bahan analisis yaitu PDRB per kapita yang diperoleh dari hasil perbandingan nilai PDRB Kabupaten Cilacap ADHK Non-migas setiap kecamatan terhadap jumlah penduduk Kabupaten Cilacap menurut kecamatan masing-masing dalam satuan juta rupiah.

3. Jumlah Penduduk

a. Definisi Konseptual

Jumlah penduduk dapat didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan penduduk yang tinggal menetap pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.

b. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, jumlah penduduk yang dimaksud adalah keseluruhan jumlah penduduk pertengahan tahun dalam satuan jiwa yang tinggal dan menetap di Kabupaten Cilacap yang tersebar di seluruh kecamatan. Angka jumlah penduduk yang digunakan yaitu jumlah penduduk yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil per Kecamatan pada data publikasi Kabupaten Cilacap Dalam Angka edisi sesuai periode analisis.

C. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka metode analisis yang digunakan yaitu analisis Tipologi Klassen, Analisis *Location Quotient* (LQ), dan Analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ). Dari analisis tersebut akan dapat diketahui jawaban-jawaban yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa identifikasi potensi pengembangan dan daya saing SWP Kabupaten Cilacap sebagai PKL serta arah strategi pembangunan Kabupaten Cilacap disesuaikan dengan pola pertumbuhan dan potensi di masing-masing kecamatan dalam SWP.

1. Analisis Tipologi Klassen

Untuk menjawab pertanyaan terkait daerah dalam SWP yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai PKL di Kabupaten Cilacap dilihat dari tipologi daerah tersebut dengan menggunakan alat analisis Tipologi Klassen. Klasifikasi daerah dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut:

- a. Kuadran I, daerah yang terklasifikasi dalam kuadran I merupakan daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*). Dimana daerah tersebut memiliki laju pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata seluruh kecamatan di Kabupaten Cilacap.
- b. Kuadran II , daerah yang terklasifikasi dalam kuadran II termasuk daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*). Dimana daerah tersebut memiliki PDRB per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan PDRB lebih rendah dibandingkan rata-rata seluruh kecamatan di Kabupaten Cilacap.
- c. Kuadran III, daerah yang terklasifikasi dalam kuadran III tergolong daerah berkembang cepat (*high growth but low income*). Dimana daerah tersebut memiliki tingkat pertumbuhan PDRB tinggi, tetapi tingkat PDRB per kapita lebih rendah dibandingkan rata-rata seluruh kecamatan di Kabupaten Cilacap.
- d. Kuadran IV, daerah yang terklasifikasi dalam kuadran IV merupakan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*). Dimana daerah tersebut memiliki laju pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita yang lebih rendah dibandingkan rata-rata seluruh kecamatan di Kabupaten Cilacap.

Tabel 3.1 Klasifikasi Tipologi Daerah

<p style="text-align: center;">Kuadran I Daerah Cepat Maju dan Cepat Berkembang $y_i > y$ dan $r_i > r$</p>	<p style="text-align: center;">Kuadran II Daerah Maju Tapi Tertekan $y_i < y$ dan $r_i > r$</p>
<p style="text-align: center;">Kuadran III Daerah Cepat Berkembang $y_i > y$ dan $r_i < r$</p>	<p style="text-align: center;">Kuadran IV Daerah Relatif Tertinggal $y_i < y$ dan $r_i < r$</p>

Sumber: Sjafrizal dalam Miroah, 2015

Dimana:

y_i : PDRB per kapita kecamatan i

r_i : Pertumbuhan PDRB kecamatan i

y : rata-rata PDRB per kapita seluruh kecamatan di Kabupaten Cilacap

r : rata-rata pertumbuhan PDRB seluruh kecamatan di Kabupaten Cilacap

2. Analisis *Location Quotient* (LQ) dan analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ)

Untuk menjawab pertanyaan terkait daya saing sektoral suatu Kecamatan dalam perekonomian antar Kecamatan di Kabupaten Cilacap yang nantinya dapat diketahui sektor unggulan, sektor andalan, sektor potensial, maupun sektor tertinggal dengan menggabungkan hasil dari analisis LQ dan DLQ.

a. *Location Quotient* (LQ)

Untuk menentukan potensi relatif perekonomian suatu wilayah digunakan salah satu alat analisis yaitu LQ (*Location Quotient*). Data

yang digunakan pada analisis LQ yaitu PDRB tingkat Kecamatan dan PDRB Kabupaten Cilacap sebagai wilayah referensi.

Untuk menghitung LQ digunakan rumus sebagai berikut:

$$LQ = \frac{(xi/PDRB)}{Xi/PNB}$$

Dimana :

LQ	= Indeks Location Quotient
xi	= Nilai tambah sektor/sub sektor <i>i</i> pada wilayah <i>i</i>
PDRB	= Produk domestik regional bruto pada wilayah <i>i</i>
Xi	= Nilai tambah sektor / sub <i>i</i> sektor secara nasional.
PNB	= Produk domestik regional bruto pada wilayah referensi.

Kriteria pengukuran LQ adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila $LQ > 1$, artinya sektor tersebut berperan lebih besar daripada sektor yang sama secara nasional sehingga seringkali sebagai petunjuk bahwa daerah tersebut surplus akan produk sektor *i* dan mengekspornya ke daerah lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki keunggulan komparatif untuk sektor *i* tersebut.
- 2) Jika $LQ < 1$, maka sektor tersebut mempunyai peran lebih kecil dibandingkan peranan sektor tersebut secara nasional.
- 3) $LQ = 1$, menunjukkan bahwa produk domestik yang dimiliki daerah tersebut habis dikonsumsi oleh daerahnya sendiri. Dimana tingkat spesialisasi sektor *i* di wilayah *i* adalah sama dengan sektor yang sama dalam perekonomian pembanding pada wilayah *i*.

Sektor dikatakan basis dan berpotensi sebagai penggerak perekonomian wilayah i apabila nilai $LQ > 1$. Sebaliknya, sektor dikatakan non basis dan kurang berpotensi sebagai penggerak perekonomian wilayah i apabila nilai $LQ < 1$.

b. *Dynamic Location Quotient (DLQ)*

Analisis LQ dinamis (DLQ) muncul sebagai bentuk lain dari analisis LQ dari waktu ke waktu. Analisis DLQ memberikan gambaran bahwa sector tersebut tumbuh lebih cepat dibandingkan sector yang sama secara nasional (wilayah referensi) atau sebaliknya. Dalam analisis DLQ data yang digunakan yaitu rata-rata pertumbuhan sector i dan rata-rata pertumbuhan PDRB di masing-masing wilayah kecamatan di Kabupaten Cilacap yang diperbandingkan dengan rata pertumbuhan sector i dan rata-rata pertumbuhan PDRB di Kabupaten Cilacap yang menjadi wilayah referensi.

Secara matematis, DLQ dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$DLQ_{ik} = \left[\frac{(1 + g_{ik}) / (1 + g_k)}{(1 + G_{ip}) / (1 + G_p)} \right]^t = \frac{IPPS_{ik}}{IPPS_{ip}}$$

Keterangan:

- DLQ_{ik} : Nilai indeks DLQ sektor i wilayah k
- g_{ik} : Rata-rata pertumbuhan sektor i wilayah k
- g_k : Rata-rata pertumbuhan PDRB wilayah k
- G_{ip} : Rata-rata pertumbuhan sektor i wilayah referensi p
- G_p : Rata-rata pertumbuhan PDRB wilayah referensi p
- t : *log* (jumlah tahun analisis)
- IPPS_{ik} : Indeks potensi pengembangan sektor i wilayah k
- IPPS_{ip} : Indeks potensi pengembangan sektor i wilayah referensi p

Adapun interpretasi hasil perhitungan indeks DLQ merujuk pada kriteria berikut, jika:

- 1) $DLQ_{ik} < 1$, maka memberikan gambaran bahwa sektor tersebut tumbuh lebih lambat dibandingkan sektor yang sama secara nasional (wilayah referensi).
- 2) $DLQ_{ik} > 1$, maka memberikan gambaran bahwa sector tersebut tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor yang sama secara nasional (wilayah referensi).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

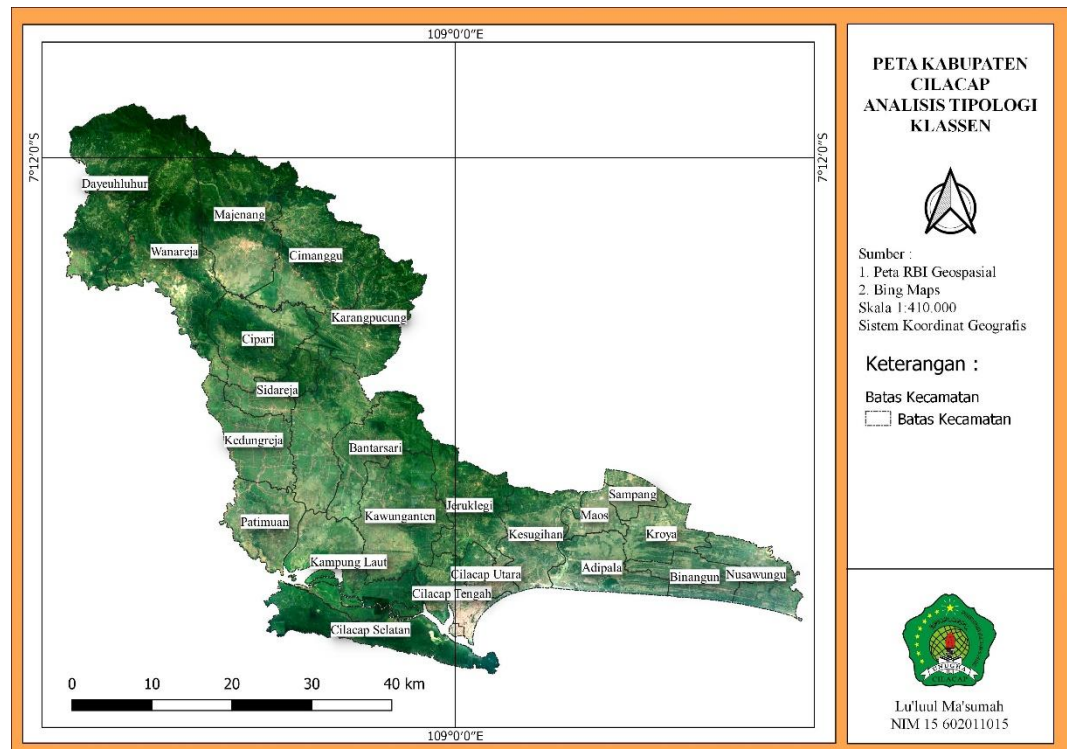
A. Deskripsi Data Penelitian

1. Keadaan Geografis Kabupaten Cilacap

a. Letak dan Keadaan

Secara geografis, Kabupaten Cilacap berada di Propinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang perbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Barat. Luas wilayah 225.361 Ha (termasuk pulau Nusakambangan seluas 11.511 Ha) dan berada pada ketinggian 6 – 198 meter di atas permukaan laut. Secara astronomis terletak diantara $108^{\circ} 4' 30''$ – $109^{\circ} 30' 30''$ garis bujur timur dan $7^{\circ} 30'$ – $7^{\circ} 45' 20''$ garis lintang selatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah selatan : Samudra Indonesia
- b. Sebelah utara : Kabupaten Banyumas
- c. Sebelah timur : Kabupaten Kebumen
- d. Sebelah barat : Propinsi Jawa Barat



Sumber : Data Primer 2020

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Cilacap

Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayeuhluhur dengan ketinggian rata-rata 198 meter dari permukaan laut dan wilayah terendah adalah Kecamatan Kampung laut dengan ketinggian rata-rata 1 meter dari permukaan laut. Secara rinci dapat kita lihat pada table 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1 Ketinggian Wilayah dari PermukaanLaut Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Ketinggian dari Permukaan Laut (m)
1.	Dayeuluhur	198
2.	Wanareja	25
3.	Majenang	23
4.	Cimanggu	40
5.	Karangpucung	50
6.	Cipari	50
7.	Sidareja	26
8.	Kedungreja	45

No.	Kecamatan	Ketinggian dari Permukaan Laut (m)
9.	Patimuan	5*)
10.	Gandrungmangu	15
11.	Bantarsari	8*)
12.	Kawunganten	56
13.	Kampong Laut	1*)
14.	Jeruklegi	9
15.	Kesugihan	8
16.	Adipala	8
17.	Maos	8
18.	Sampang	8*)
19.	Kroya	10
20.	Binangun	8
21.	Nusawungu	10
22.	Cilacap Selatan	6
23.	Cilacap Tengah	5
24.	Cilcapa Utara	6

Sumber: BPS, Cilacap Dalam Angka 2019

Berdasarkan penggunaan lahan sawah luas wilayah terbagi kedalam berbagai penggunaan yaitu irigasi seluas 47.099 Ha atau sekitar 22,02 persen, Tadah hujan seluas 16.431 Ha atau 7,68 persen, Rawa pasang surut seluas 514 Ha atau 0,24 persen, Rawa lebak seluas 694 Ha atau 0,32 persen. Sedangkan penggunaan lahan bukan sawah terbagi kedalam berbagai penggunaan yaitu tegal/kebun seluas 41.242 Ha atau sekitar 19,29 persen, ladang/huma seluas 1.547 Ha atau 0,72 persen, perkebunan seluas 12.456 Ha atau 5,82 persen, hutan rakyat seluas 5.872 Ha atau 2,75 persen, tidak diusahakan seluas 142 Ha atau 0,07 persen, tambak, kolam/empang adalah 18.368 Ha atau 8,59 persen, hutan Negara seluas 26.948 Ha atau sebesar 12,60 persen, dan lahan bukan pertanian seluas 42.537 atau sekitar 19,89 persen. Secara rinci dapat kita lihat pada tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2 Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Cilacap

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Lahan Sawah		
1.	Irigasi	47.099
2.	Tadah Hujan	16.431
3.	Rawa Pasang Surut	514
4.	Rawa Lebak	694
Jumlah Lahan Sawah		64.738
Lahan Bukan Sawah		
1.	Tegal/Kebun	41.242
2.	Lading/ Huma	1.547
3.	Perkebunan	12.456
4.	Ditanami Pohon / Hutan Rakyat	5.872
5.	Padang Penggembalaan/ Padang Rumput	0
6.	Sementara Tidak Diusahakan	142
7.	Lainnya (Tambak, Kolam, Empang, Hutan Negara, dll)	18.368
8.	Hutan Negara	26.948
Jumlah Lahan Bukan Sawah		106.575
Lahan Bukan Pertanian (jalan, Permukiman, dll)		42.537
Total Luas Lahan		213.850

Sumber: BPS, Cilacap Dalam Angka 2019

b. Luas Wilayah

Kabupaten Cilacap memiliki luas wilayah 213.850 Ha (tidak termasuk Nusakambangan) yang terbagi dalam 24 Kecamatan, 269 Desa, 15 Kelurahan, 2.319 RW dan 10.463 RT. Secara rinci dapat kita lihat pada tabel 4.3 di bawah ini :

Tabel 4.3 Wilayah Administratif Menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT, RW, dan Luas Wilayah

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	RT	RW	Luas Wilayah (Ha)
1.	Dayeuluhur	14	-	386	118	18.506,10
2.	Wanareja	16	-	665	182	18.973,31
3.	Majenang	17	-	785	167	13.856,19
4.	Cimanggu	15	-	446	107	16.744
5.	Karangpucung	14	-	417	107	11.512,43
6.	Cipari	11	-	363	80	12.148
7.	Sidareja	10	-	293	54	5.495,48
8.	Kedungreja	11	-	485	93	7.143
9.	Patimuan	7	-	322	79	7.530
10.	Gandrungmangu	14	-	583	88	14.319,40
11.	Bantarsari	8	-	410	67	9.554
12.	Kawunganten	12	-	468	80	11.743
13.	Kampong Laut	4	-	128	39	14.598

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	RT	RW	Luas Wilayah (Ha)
14.	Jeruklegi	13	-	432	83	9.679,46
15.	Kesugihan	16	-	690	156	8.230,62
16.	Adipala	16	-	515	118	6.118,68
17.	Maos	10	-	263	66	2.804,15
18.	Sampang	10	-	228	72	2.730,13
19.	Kroya	17	-	550	111	5.883,39
20.	Binangun	17	-	363	110	5.142,43
21.	Nusawungu	17	-	452	119	6.126,44
22.	Cilacap Selatan	-	5	447	73	910,61
23.	Cilacap Tengah	-	5	421	80	2.217,20
24.	Cilcapa Utara	-	5	351	70	1.883,83
Jumlah		269	15	10.463	2.319	213.850

Sumber : BPS, Cilacap Dalam Angka 2019, diolah

Luas wilayah Kabupaten Cilacap tersebut berdasarkan struktur ruang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 dibagi menjadi 4 Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) yaitu:

1) Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) I

Satuan wilayah pembangunan ini meliputi sub wilayah pembangunan yaitu Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Jeruklegi, Kesugihan, Kampung Laut, dan Kawunganten dimana pusat pembangunannya berada di kawasan perkotaan Cilacap.

2) Satuan Wilayah Pembangunan II

Satuan wilayah pembangunan ini meliputi sub wilayah pembangunan yaitu Kecamatan Kroya, Maos, Sampang, Adipala, Binangun dan Nusawungu dimana pusat pembangunannya berada di kawasan perkotaan Kroya.

3) Satuan Wilayah Pembangunan III

Satuan wilayah pembangunan ini meliputi sub wilayah pembangunan yaitu Kecamatan Sidareja, Bantarsari, Gandrungmangu, Kedungreja, Patimuan, dan Cipari dimana pusat pembangunannya berada di kawasan perkotaan Sidareja.

4) Satuan Wilayah Pembangunan IV

Satuan wilayah pembangunan ini meliputi sub wilayah pembangunan yaitu Kecamatan Majenang, Dayeuhluhur, Wanareja, Cimanggu, dan Karangpucung dimana pusat pembangunannya berada di kawasan perkotaan Majenang.

Pembagian tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk memudahkan pemerintah daerah dalam mendistribusikan program pembangunan yang sesuai dengan karakter masing-masing wilayah yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung lainnya serta dengan dihubungkan oleh sistem jaringan prasara wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi.

2. Keadaan Demografis

Terhitung pada akhir tahun 2018, penduduk Kabupaten Cilacap yang terdaftar berjumlah 1.906.849 jiwa. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 964.101 laki-laki dan 942.748 perempuan dengan jumlah keluarga sebanyak 475.299 KK yang mayoritas bermata pencaharian di bidang pertanian. Data keadaan penduduk akhir tahun 2018 menunjukkan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Cilacap Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Dayeuluhur	24.127	24.682	48.809
2.	Wanareja	51.833	51.024	102.857
3.	Majenang	68.129	67.263	135.392
4.	Cimanggu	51.941	50.278	102.219
5.	Karangpucung	40.325	39.053	79.378
6.	Cipari	32.537	31.842	64.379
7.	Sidareja	31.115	30.857	61.972
8.	Kedungreja	42.919	41.638	84.557
9.	Patimuan	24.608	24.120	48.728
10.	Gandrungmangu	54.458	52.711	107.169
11.	Bantarsari	36.271	35.112	71.383
12.	Kawunganten	42.558	41.195	83.753
13.	Kampung Laut	7.847	7.196	15.043
14.	Jeruklegi	37.387	36.318	73.705
15.	Kesugihan	65.875	63.705	129.580
16.	Adipala	46.130	44.939	91.069
17.	Maos	23.500	23.506	47.006
18.	Sampang	21.252	21.120	42.372
19.	Kroya	57.242	55.969	113.211
20.	Binangun	33.534	32.988	66.522
21.	Nusawungu	42.034	41.150	83.184
22.	Cilacap Selatan	41.927	41.402	83.329
23.	Cilacap Tengah	45.346	44.362	89.708
24.	Cilcapa Utara	41.206	40.318	81.524
Jumlah		964.101	942.748	1.906.849

Sumber : BPS, *Cilacap Dalam Angka 2019*, diolah

Ketidakmerataan persebaran penduduk Kabupaten Cilacap tergambar jelas pada tabel 4.5. Dimana Kecamatan Majenang memiliki konsentrasi penduduk tertinggi sekitar 7,1 persen dari keseluruhan populasi penduduk Kabupaten Cilacap. Disusul pada urutan kedua adalah Kecamatan Kesugihan dengan jumlah penduduk mencapai 6,79 persen dari keseluruhan populasi. Sementara populasi terkecil berada di Kecamatan Kampung Laut yaitu hanya sekitar 0,78 persen penduduk Kabupaten Cilacap.

Ketidaksamaan luas lahan yang disertai dengan jumlah populasi yang bervariasi, berdampak pada tingkat kepadatan penduduk yang beragam di setiap kecamatan. Hingga akhir 2018, kepadatan penduduk Kabupaten

Cilacap secara rata-rata tercatat 892 jiwa/km². Kecamatan Cilacap Selatan menjadi daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, sementara Kecamatan Kampung Laut menjadi terendah.

Tabel 4.5 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Cilacap Tahun 2018

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Penduduk	Kepadatan
1.	Dayeuluhur	185,06	48.809	264
2.	Wanareja	189,73	102.857	542
3.	Majenang	138,56	135.392	977
4.	Cimanggu	167,44	102.219	610
5.	Karangpucung	115,00	79.378	690
6.	Cipari	121,47	64.379	530
7.	Sidareja	54,95	61.972	1128
8.	Kedungreja	71,43	84.557	1184
9.	Patimuan	75,30	48.728	647
10.	Gandrungmangu	143,19	107.169	748
11.	Bantarsari	95,54	71.383	747
12.	Kawunganten	117,43	83.753	713
13.	Kampung Laut	146,14	15.043	103
14.	Jeruklegi	96,80	73.705	761
15.	Kesugihan	82,31	129.580	1574
16.	Adipala	61,19	91.069	1488
17.	Maos	28,05	47.006	1676
18.	Sampang	27,30	42.372	1552
19.	Kroya	58,83	113.211	1924
20.	Binangun	51,42	66.522	1294
21.	Nusawungu	61,26	83.184	1358
22.	Cilacap Selatan	9,11	83.329	9147
23.	Cilacap Tengah	22,15	89.708	4050
24.	Cilcapa Utara	18,84	81.524	4327
Jumlah		2.138,50	1.906.849	892

Sumber : BPS, Cilacap Dalam Angka 2019, diolah

3. Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap

Selama rentang waktu pengamatan, PDRB Kabupaten Cilacap terus mengalami perubahan positif. Perubahan tersebut secara periodik nampak pada tabel 4.6 berikut.

**Tabel 4.6 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cilacap
Menurut Lapangan Usaha ADHK Non Migas
Tahun 2014-2018**

SektorEkonomi	2014	2015	2016	2017	2018
1	6.030.826,89	6.405.714,72	6.598.526,96	6.775.401,66	6.906.972,16
2	2.338.906,01	2.346.647,81	2.351.288,30	2.405.568,34	2.490.320,44
3	12.134.375,64	12.590.130,51	13.175.441,82	13.693.331,01	14.104.921,14
4	84.050,35	91.148,89	97.353,43	105.107,54	112.781,03
5	3.730.933,09	3.997.282,72	4.358.149,69	4.659.630,25	4.938.082,47
6	4.114.354,51	4.364.309,17	4.652.880,65	5.005.934,68	5.407.076,86
7	4.069.279,81	4.490.076,10	4.729.753,05	5.063.456,38	5.714.872,05
8	3.625.624,44	3.855.813,16	4.094.147,89	4.366.535,47	4.666.081,64
9	565.538,25	588.446,53	625.800,66	682.204,47	746.402,25
PDRB	36.693.888,99	38.729.569,61	40.683.342,45	42.757.169,80	45.087.510,04

Sumber : BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Cilacap 2014-2018,

Keterangan:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Pertanian | 6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran |
| 2. Pertambangan dan Penggalian | 7. Pengangkutan dan Komunikasi |
| 3. IndustriPengolahan | 8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa
Perusahaan |
| 4. Listrik, Gas, dan Air Minum | 9. Jasa-jasa |
| 5. Bangunan | |

Berdasarkan hasil analisis sektoral di atas dapat mengungkap struktur perekonomian Kabupaten Cilacap secara garis besar. Industri pengolahan menjadi sektor ekonomi paling dominan dalam pembentukan PDRB di awal tahun pengamatan dengan tingkat kontribusi sebesar 32,78 persen. Meski terkoreksi dengan kecenderungan menurun, sektor industri pengolahan masih tetap menjadi sektor ekonomi utama hingga tahun 2018. Secara keseluruhan sektor ini menyumbang nilai tambah lebih dari 30 persen dari total PDRB setiap tahunnya.

Pertanian serta pengangkutan dan komunikasi merupakan dua sektor ekonomi yang juga mampu menghasilkan nilai tambah terbesar kedua dan ketiga setelah industri pengolahan. Tingkat kontribusi sektor pertanian

menunjukkan adanya perkembangan yang fluktuatif sehingga tetap menjadi sektor ekonomi yang memiliki peranan yang signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Cilacap walaupun dengan kecenderungan menurun. Sebaliknya, peranan sektor pengangkutan dan komunikasi menunjukkan geliat perkembangan yang meyakinkan. Selain memang menjadi sektor dominan ketiga dalam perekonomian Kabupaten Cilacap, kontribusi sektor ini menunjukkan besaran yang meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat, besaran kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi meningkat dari sekitar 11,35 persen di tahun 2015 menjadi 12,27 persen di akhir tahun 2018.

Tabel 4.7 Kontribusi Sektoral dalam Struktur Ekonomi Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2018

Sektor Ekonomi	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata
1	16,49	16,38	16,03	15,58	16,12
2	6,21	5,92	5,70	5,57	5,85
3	32,78	32,45	32,20	31,64	32,27
4	0,23	0,24	0,24	0,25	0,24
5	10,25	10,52	10,81	10,93	10,63
6	11,24	11,35	11,58	11,85	11,51
7	11,35	11,61	11,74	12,27	11,74
8	9,92	10,01	10,14	10,28	10,09
9	1,53	1,53	1,57	1,63	1,56
Total	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Cilacap 2014-2018, diolah

Keterangan:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Pertanian | 6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran |
| 2. Pertambangan dan Penggalian | 7. Pengangkutan dan Komunikasi |
| 3. Industri Pengolahan | 8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan |
| 4. Listrik, Gas, dan Air Minum | 9. Jasa-jasa |
| 5. Bangunan | |

Sektor ekonomi lain yang memberikan peranan cukup besar bagi perekonomian Kabupaten Cilacap adalah perdagangan, hotel, dan restoran. Dimana peranan sektor ini semakin meningkat hingga pada tahun 2018 telah mampu menghasilkan nilai tambah sebesar 11,51 persen dari total PDRB.

Pengamatan secara pengelompokan sektor ekonomi memberikan informasi bahwa tengah terjadi transformasi struktur ekonomi di Kabupaten Cilacap. Tampak pada tabel 4.7, tumpuan utama perekonomian Kabupaten Cilacap mulai bergeser dari sektor primer menuju sektor sekunder. Pergeseran ini terlihat dari peranan sektor primer yang meskipun tetap dominan namun semakin menurun dari tahun ketahun. Fakta ini berbeda dengan peran sektor sekunder dalam perekonomian daerah yang kian meningkat.

Kemudian kita lihat secara garis besar dari sisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap yang tentunya tidak terlepas dari geliat aktivitas ekonomi sektoral pembentuk PDRB. Kesembilan sektor ekonomi tersebut mengalami skala pertumbuhan yang beragam seperti tampak pada tabel 4.8 berikut.

Tabel 4.8 Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Kabupaten Cilacap Tahun 2015-2018

SektorEkonomi	2015	2016	2017	2018	Rata-Rata(%)
1	6,22	3,01	2,68	1,94	3,46
2	0,33	0,20	2,31	3,52	1,59
3	3,76	4,65	3,93	3,01	3,84
4	8,45	6,81	7,96	7,30	7,63

5	7,14	9,03	6,92	5,98	7,27
6	6,08	6,61	7,59	8,01	7,07
7	10,34	5,34	7,06	12,87	8,90
8	6,35	6,18	6,65	6,86	6,51
9	4,05	6,35	9,01	9,41	7,21
Total	5,55	5,04	5,10	5,45	5,29

Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Cilacap 2014-2018, diolah

Keterangan:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Pertanian | 6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran |
| 2. Pertambangan dan Penggalian | 7. Pengangkutan dan Komunikasi |
| 3. Industri Pengolahan | 8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan |
| 4. Listrik, Gas, dan Air Minum | 9. Jasa-jasa |
| 5. Bangunan | |

Beberapa sektor ekonomi pada tahun 2016 seperti sektor industri pengolahan; bangunan; perdagangan, hotel, dan restoran; serta sektor jasa-jasa menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kelima sektor selain itu mengalami penurunan laju pertumbuhan. Satu tahun kemudian, hampir seluruh sektor mengalami perubahan positif. Hanya terdapat tiga sektor yaitu pertanian, industri pengolahan serta bangunan. Hingga akhir tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap masih menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif, dimana beberapa sektor mengalami pertumbuhan positif dan ada juga beberapa sektor masih menunjukkan pertumbuhan yang negatif. Namun, sektor pengangkutan dan komunikasi menunjukkan suatu pertumbuhan sebesar 12,87 persen dimana angka pertumbuhan tersebut cukup mengesankan.

Secara rata-rata, meski tetap menjadi sektor dominan dalam pembentukan PDRB, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian selalu tumbuh di bawah laju pertumbuhan PDRB. Dimana sektor industri pengolahan menunjukkan laju pertumbuhan rata-rata 3,84 persen serta sektor

pertanian memiliki laju pertumbuhan rata-rata 3,46 persen. Sementara sektor-sektor lain justru memiliki laju pertumbuhan rata-rata di atas PDRB yang berada di kisaran 5,29 persen. Perkembangan laju pertumbuhan selama tahun 2015 hingga 2018 tersebut menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan dan sektor pertanian memiliki kinerja yang tidak begitu mengesankan seperti sektor ekonomi lainnya secara regional.

B. Analisis Perekonomian Kecamatan

Perekonomian Kabupaten Cilacap tidak terlepas dari peran serta kegiatan perekonomian tiap-tiap kecamatan. Oleh karenanya, pemetaan potensi di tiap-tiap satuan pemerintah sangat diperlukan dalam perumusan strategi pembangunan. Hasil pemetaan tersebut nantinya akan sangat berguna dalam penyusunan perencanaan prioritas pembangunan masing-masing sub regional (kecamatan). Dengan demikian, peluang apa dan di daerah mana akan dapat ditentukan secara cepat dan tepat.

Atas alasan tersebut, pada bagian ini akan dijabarkan beberapa analisis berkenaan dengan perekonomian sub regional yang mencakup 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap yang terbagi dalam 4 Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) daritahun 2014 hingga 2018.

1. Tipologi Daerah

Tipologi daerah ditujukan untuk mengungkap karakteristik perekonomian setiap daerah kecamatan di Kabupaten Cilacap. Berdasarkan karakteristik itulah setiap kecamatan di Kabupaten Cilacap diklasifikasikan kedalam empat kategori, yakni daerah yang cepat maju

Dan tumbuh, daerah yang maju tapi tertekan, daerah yang berkembangcepat, serta daerah yang relatif tertinggal.

Dari analisis tipologi daerah terungkap bahwa dalam dimensi perekonomian Kabupaten Cilacap atau seluruh kecamatan berdasarkan nilai PDRB per kapita, terdapat tiga kecamatan yang terklasifikasi sebagai daerah yang cepat maju dan tumbuh yakni Kecamatan Patimuan, Adipala, dan Maos. Selama periode pengamatan, perekonomian ketiganya tumbuh lebih cepat dengan nilai PDRB per kapita lebih besar dibandingkan kecamatan lain. Sementara itu sebagai ibu kota kabupaten atau kawasan pusat perkotaan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kecamatan Cilacap Tengah, serta Kecamatan Cilacap Utara justru termasuk dalam daerah yang maju tetapi tertekan. Dimana memiliki pertumbuhan ekonomi yang lambat walaupun memiliki nilai PDRB per kapita di atas rata-rata serupa dengan Kecamatan Kesugihan, Kecamatan Binangun, Kecamatan Nusawungu, serta Kecamatan Bantarsari. Sebaliknya Kecamatan Karangpucung, Cipari, Sidareja, dan Kampung Laut termasuk daerah yang berkembang cepat akan tetapi memiliki nilai PDRB per kapita di bawah rata-rata. Adapun Kecamatan Dayeuluhur, Wanareja, Majenang, Cimanggu, Kedungreja, Gandrungmangu, Kawunganten, Jeruklegi, Sampang, dan Kroya teridentifikasi sebagai daerah relatif tertinggal. Dibandingkan kecamatan lainnya, perekonomian kesepuluh kecamatan tersebut tumbuh lebih lamban dengan nilai PDRB per kapita di bawah rata-rata.

Tabel 4.9 PDRB Per Kapita dan Klasifikasi Tipologi Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2014-2018

Kecamatan	PDRB Per Kapita (Rupiah)	Klasifikasi
Dayeuluhur	16,526,803.98	IV
Wanareja	16,769,869.97	IV
Majenang	19,599,426.40	IV
Cimanggu	19,713,599.13	IV
Karangpucung	17,113,617.37	III
Cipari	20,397,534.51	III
Sidareja	19,478,801.27	III
Kedungreja	18,460,288.10	IV
Patimuan	48,174,443.50	I
Gandrungmangu	14,627,145.08	IV
Bantarsari	37,871,653.15	II
Kawunganten	14,397,248.67	IV
Kampong Laut	12,551,192.30	III
Jeruklegi	15,219,331.28	IV
Kesugihan	25,110,416.38	II
Adipala	50,303,016.74	I
Maos	26,448,074.83	I
Sampang	13,906,456.82	IV
Kroya	18,441,780.75	IV
Binangun	24,618,780.29	II
Nusawungu	35,635,622.64	II
Cilacap Selatan	28,409,975.78	II
Cilacap Tengah	30,969,649.12	II
Cilcap Utara	22,202,464.12	II
Rata-Rata	22,170,462.76	

Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Cilacap 2014-2018, diolah

2. Identifikasi Daya Saing Sektoral

Upaya identifikasi daya saing sektoral dilakukan melalui analisis LQ dan DLQ. Keduanya masing-masing bertujuan mengungkap keunggulan komparatif dan kompetitif suatu sektor ekonomi dari suatu daerah. Suatu sektor ekonomi teridentifikasi unggul secara komparatif ($LQ > 1$) jika menghasilkan nilai tambah atau memiliki kontribusi bagi PDRB daerahnya yang lebih besar dibandingkan sektor yang sama bagi PDRB Kabupaten Cilacap sebagai daerah referensi. Sementara suatu sektor ekonomi teridentifikasi unggul secara kompetitif jika tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor yang sama pada daerah referensi ($DLQ > 1$).

Keunggulan masing-masing sektor di setiap kecamatan dapat dilihat pada hasil perhitungan keduanya yang tersaji pada lampiran 7.

Setelah teridentifikasi daya saing dilakukan, kemudian melalui teknik *overlay* terhadap hasil LQ dan DLQ, sektor ekonomi setiap kecamatan diklasifikasikan kedalam sektor unggulan, sektor andalan, sektor prospektif, maupun sektor tertinggal. Pengklasifikasian tersebut didasarkan pada kriteria apabila suatu sektor ekonomi teridentifikasi unggul secara komparatif ($LQ > 1$) dan kompetitif ($DLQ > 1$) maka sektor tersebut terklasifikasi ke dalam sektor unggulan. Jika suatu sektor ekonomi teridentifikasi unggul secara komparatif ($LQ > 1$) tapi tidak kompetitif ($DLQ < 1$), maka sektor tersebut terklasifikasi ke dalam sektor prospektif. Sebaliknya, suatu sektor terklasifikasi dalam sektor andalan jika teridentifikasi kompetitif ($DLQ > 1$) tapi tidak unggul secara komparatif ($LQ < 1$). Namun jika suatu sektor ekonomi teridentifikasi tidak unggul secara komparatif ($LQ < 1$) dan tidak pula kompetitif ($DLQ < 1$), maka sektor tersebut terklasifikasi ke dalam sektor tertinggal. Hasil analisis tersebut dijabarkan sebagai berikut.

a. Kecamatan Dayeuluhur

Kecamatan Dayeuluhur diketahui memiliki sektor ekonomi unggulan dan andalan, dimana sektor ekonominya tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor yang sama pada perekonomian Kabupaten Cilacap. Sektor-sektor tersebut yaitu sektor pertanian; sektor listrik, gas, dan air bersih; serta sektor perdagangan, hotel dan restoran diklasifikasikan

sebagai sektor unggulan. Sementara sektor bangunan; dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan diklasifikasikan sebagai sektor andalan.

Tabel 4.10 Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Dayeuluhur Menurut Daya Saing Tahun 2014-2018

Kriteria	LQ > 1	LQ < 1
DLQ > 1	<u>Sektor Unggulan:</u> Pertanian; Listrik, Gas dan Air Bersih; Perdagangan, Hotel dan Restoran	<u>Sektor Andalan:</u> Bangunan; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
DLQ < 1	<u>Sektor Prospektif:</u> Pertambangan dan Penggalian; Pengangkutan dan Komunikasi	<u>Sektor Tertinggal:</u> Industri Pengolahan; Jasa-Jasa

Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Cilacap 2014-2018, diolah

Berdasarkan tabel tersebut di atas sektor yang memiliki kontribusi lebih besar dibandingkan sektor lain tetapi tumbuh lebih lambat sehingga terklasifikasi ke dalam sektor prospektif yaitu sektor petambangan dan penggalian; serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan sektor industri pengolahan; dan sektor jasa-jasa sebagai sektor tertinggal karena tingkat kontribusinya yang lebih kecil dengan laju pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap.

b. Kecamatan Wanareja

Tidak ada satu pun sector ekonomi di Kecamatan Wanareja terklasifikasi sebagai sector prospektif. Ini dikarenakan beberapa sektor

Ekonomi Kecamatan Wanareja yang tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor yang sama pada perekonomian Kabupaten Cilacap. Sektor tersebut diantaranya yaitu sector pertanian; sector listrik, gas dan air bersih; sector perdagangan, hotel dan restoran; serta sector pengangkutan dan komunikasi. Dimana beberapa sektor tersebut merupakan sektor unggulan dalam perekonomian Kecamatan Wanareja.

Sementara sector bangunan terklasifikasi sebagai sector andalan pada perekonomian Kecamatan Wanareja. Sedangkan beberapa sektor yang lain seperti sector pertambangan dan penggalian; sector industry pengolahan; sector keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa masih teridentifikasi sebagai sektor yang tertinggal. Hal tersebut terjadi karena tingkat kontribusinya yang lebih kecil dengan laju pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap.

Tabel 4.11 Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Wanareja Menurut Daya Saing Tahun 2014-2018

Kriteria	LQ > 1	LQ < 1
DLQ > 1	<u>Sektor Unggulan:</u> Pertanian;Listrik, Gas dan Air Bersih;Perdagangan, Hotel dan Restoran;Pengangkutan danKomunikasi	<u>Sektor Andalan:</u> Bangunan;
DLQ < 1	<u>Sektor Prospektif:</u> -	<u>Sektor Tertinggal:</u> Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Keuangan, Persewaan dan

Kriteria	LQ > 1	LQ < 1
		Jasa Perusahaan; Jasa-Jasa

Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Cilacap 2014-2018, diolah

c. Kecamatan Majenang

Kecamatan Majenang diketahui memiliki sektor ekonomi unggulan dan andalan, dimana sektor ekonominya tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor yang sama pada perekonomian Kabupaten Cilacap. Sektor-sektor tersebut yaitu sektor pertanian; serta sektor perdagangan, hotel dan restoran diklasifikasikan sebagai sektor unggulan. Sementara sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; serta sektor bangunan diklasifikasikan sebagai sektor andalan.

Adapun sektor pertambangan dan penggalian; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan ketiganya memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap namun tumbuh lebih lambat sehingga terklasifikasi ke dalam sektor prospektif. Sedangkan sektor jasa-jasa sebagai sektor tertinggal karena tingkat kontribusinya yang lebih kecil dengan laju pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap.

Tabel 4.12 Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Majenang Menurut Daya Saing Tahun 2014-2018

Kriteria	LQ > 1	LQ < 1
DLQ > 1	<u>Sektor Unggulan:</u> Pertanian;Perdagangan, Hotel dan Restoran	<u>Sektor Andalan:</u> Industri Pengolahan;Listrik, Gas dan Air Bersih;Bangunan;
DLQ < 1	<u>Sektor Prospektif:</u> Pertambangan danPenggalian;Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	<u>Sektor Tertinggal:</u> Jasa-Jasa

Sumber: BPS,PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Cilacap 2014-2018, diolah

d. Kecamatan Cimanggu

Sektor-sektor ekonomi Kecamatan Cimanggu terklasifikasi ke dalam sector unggulan, sector andalan, sector prospektif, maupun sector tertinggal. Dimana ada beberapa sektor yang tumbuh cepat dan ada juga yang tumbuh lebih lambat dibandingkan sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap.

Beberapa sektor ekonomi seperti sector bangunan; sector perdagangan, hotel dan restoran; serta sector keuangan, persewaan dan jasa perusahaan terklasifikasi sebagai sector unggulan dalam perekonomian Kecamatan Cimanggu. Kemudian sector industry pengolahan; sector listrik, gas dan air bersih; sector pengangkutan dan komunikasi; serta sector jasa-jasa merupakan beberapa sektor ekonomi yang terklasifikasi dalam sector andalan. Sedangkan sector ekonomi

yang lain teridentifikasi ke dalam sector prospektif dan sector tertinggal yaitu sector pertanian dan sector pertambangan dan penggalian.

Tabel 4.13 Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Cimanggu Menurut Daya Saing Tahun 2014-2018

Kriteria	LQ > 1	LQ < 1
DLQ > 1	<u>Sektor Unggulan:</u> Bangunan;Perdagangan, Hotel dan Restoran; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	<u>Sektor Andalan:</u> Industri Pengolahan;Listrik, Gas dan AirBersih;Pengangkutan dan Komunikasi;Jasa- Jasa
DLQ < 1	<u>Sektor Prospektif:</u> Pertanian	<u>Sektor Tertinggal:</u> Pertambangan dan Penggalian

Sumber: BPS,PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Cilacap 2014-2018, diolah

e. Kecamatan Karangpucung

Diketahui bahwa dalam perekonomian Kecamatan Karangpucung terdapat beberapa sektor ekonomi yang terklasifikasi sebagai sektor ekonomi unggulan maupun andalan, ditunjukkan dengan pertumbuhan sektor ekonominya yang lebih cepat dari sektor yang sama pada perekonomian di Kabupaten Cilacap. Sektor tersebut diantaranya yaitu sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas, dan air bersih; serta sektor perdagangan, hotel dan restoran yang terklasifikasi ke dalam sektor unggulan. Sementara itu, sektor ekonomi yang terklasifikasi sebagai sektor andalan yaitu sektor bangunan.

Adapun sektor ekonomi yang memiliki nilai kontribusi cukup besar akan tetapi menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat sehingga termasuk dalam sektor yang prospektif. Sektor tersebut yaitu sektor

pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sedangkan sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor jasa-jasa sebagai sektor tertinggal karena tingkat kontribusinya yang lebih kecil dengan laju pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap.

Tabel 4.14 Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Karangpucung Menurut Daya Saing Tahun 2014-2018

Kriteria	LQ > 1	LQ < 1
DLQ > 1	<u>Sektor Unggulan:</u> Industri Pengolahan; Listrik, Gas dan Air Bersih; Perdagangan, Hotel dan Restoran	<u>Sektor Andalan:</u> Bangunan;
DLQ < 1	<u>Sektor Prospektif:</u> Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	<u>Sektor Tertinggal:</u> Pertanian; Pertambangan dan Penggalian; Jasa-Jasa

Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Cilacap 2014-2018, diolah

f. Kecamatan Cipari

Sektor-sektor ekonomi Kecamatan Cipari terklasifikasi ke dalam sector unggulan, sector andalan, sector prospektif, maupun sector tertinggal. Dimana ada beberapa sektor yang tumbuh cepat dan ada juga yang tumbuh lebih lambat dibandingkan sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap.

Adapun beberapa sektor ekonomi dalam perekonomian Kecamatan Cipari seperti sector pertanian; dan sector bangunan

merupakan beberapa sektor yang teridentifikasi ke dalam sektor unggulan. Kemudian sektor ekonomi lain yang teridentifikasi sebagai sector andalan adalah sector listrik, gas dan air bersih; sector perdagangan, hotel dan restoran; serta sector pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan sector ekonomi yang teridentifikasi ke dalam sector prospektif yaitu sector keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sector tertinggal yaitu sector industry pengolahan; sector pertambangan dan penggalian; serta sector jasa-jasa.

Tabel 4.15 Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Cipari Menurut Daya Saing Tahun 2014-2018

Kriteria	LQ > 1	LQ < 1
DLQ > 1	<u>Sektor Unggulan:</u> Pertanian; Bangunan;	<u>Sektor Andalan:</u> Listrik, Gas dan Air Bersih; Perdagangan, Hotel dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi
DLQ < 1	<u>Sektor Prospektif:</u> Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	<u>Sektor Tertinggal:</u> Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Jasa-Jasa

Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Cilacap 2014-2018, diolah

g. Kecamatan Sidareja

Kecamatan Sidareja diketahui hanya memiliki satu sektor ekonomi unggulan yaitu sektor industri pengolahan, dimana sektor ekonominya tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor yang sama pada perekonomian Kabupaten Cilacap, dan tidak memiliki sektor andalan. Adapun sektor bangunan; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan ketiganya memiliki

kontribusi yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap namun tumbuh lebih lambat sehingga terklasifikasi ke dalam sektor prospektif. Sedangkan sektor ekonomi yang teridentifikasi sebagai sektor ekonomi yang tertinggal dimana tingkat kontribusi yang lebih kecil kemudian laju pertumbuhannya juga tumbuh lebih lambat dibandingkan sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap. Sektor tersebut diantaranya yaitu sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan juga sektor jasa-jasa.

Tabel 4.16 Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Sidareja Menurut Daya Saing Tahun 2014-2018

Kriteria	LQ > 1	LQ < 1
DLQ > 1	<u>Sektor Unggulan:</u> Industri Pengolahan;	<u>Sektor Andalan:</u> -
DLQ < 1	<u>Sektor Prospektif:</u> Bangunan;Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	<u>Sektor Tertinggal:</u> Pertanian;Pertambangan dan Penggalian;Listrik, Gas dan Air Bersih; Perdagangan, Hotel dan Restoran;Jasa-Jasa

Sumber: BPS,PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Cilacap 2014-2018, diolah

h. Kecamatan Kedungreja

Tidak ada satu pun sector ekonomi di Kecamatan Kedungreja terklasifikasi sebagai sector prospektif. Ini dikarenakan sektor-sektor ekonomi Kecamatan Kedungreja beberapa tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor yang sama pada perekonomian Kabupaten Cilacap.

Termasuk didalamnya sebagai sector unggulan dalam perekonomian Kecamatan Kedungreja adalah sektor pertanian; sector listrik, gas dan air bersih; serta sector bangunan.

Sementara sector industri pengolahan; serta sector perdagangan, hotel dan restoran terklasifikasi sebagai sector andalan pada perekonomian Kecamatan Kedungreja. Sedangkan beberapa sector yang lain masih terklasifikasi sebagai sector tertinggal yaitu sector pertambangan dan penggalan; sector pengangkutan dan komunikasi; sector keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sector jasa-jasa. Hal tersebut terjadi karena tingkat kontribusinya yang lebih kecil dengan laju pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan sector yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap.

Tabel 4.17 Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Kedungreja Menurut Daya Saing Tahun 2014-2018

Kriteria	LQ > 1	LQ < 1
DLQ > 1	<u>Sektor Unggulan:</u> Pertanian; Listrik, Gas dan Air Bersih; Bangunan	<u>Sektor Andalan:</u> Industri Pengolahan; Perdagangan, Hotel dan Restoran
DLQ < 1	<u>Sektor Prospektif:</u> -	<u>Sektor Tertinggal:</u> Pertambangan dan Penggalan; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; Jasa-Jasa

Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Cilacap 2014-2018, diolah

i. Kecamatan Patimuan

Kecamatan Patimuan diketahui memiliki sektor ekonomi unggulan dan andalan, dimana sektor ekonominya tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor yang sama pada perekonomian Kabupaten Cilacap. Sektor-sektor tersebut yaitu sektor pertambangan dan penggalan; serta sektor industri pengolahan diklasifikasikan sebagai sektor unggulan. Sementara sektor pertanian diklasifikasikan sebagai sektor andalan.

Adapun sektor bangunan yang memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap namun tumbuh lebih lambat sehingga terklasifikasi ke dalam sektor prospektif. Sedangkan sektor listrik, gas dan air bersih; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa masih terklasifikasi sebagai sektor tertinggal karena tingkat kontribusinya yang lebih kecil dengan laju pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap.

Tabel 4.18 Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Patimuan Menurut Daya Saing Tahun 2014-2018

Kriteria	LQ > 1	LQ < 1
DLQ > 1	<u>Sektor Unggulan:</u> Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan;	<u>Sektor Andalan:</u> Pertanian;
DLQ < 1	<u>Sektor Prospektif:</u> Bangunan;	<u>Sektor Tertinggal:</u> Listrik, Gas dan Air

Kriteria	LQ > 1	LQ < 1
		Bersih; Perdagangan, Hotel dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; Jasa-Jasa

Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Cilacap 2014-2018, diolah

j. Kecamatan Gandrungmangu

Tidak ada satu pun sektor ekonomi di Kecamatan Gandrungmangu terklasifikasi sebagai sector prospektif. Ini dikarenakan sektor-sektor ekonomi Kecamatan Gandrungmangu beberapa tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor yang sama pada perekonomian Kabupaten Cilacap. Termasuk didalamnya sebagai sector unggulan dalam perekonomian Kecamatan Gandrungmangu adalah sektor pertanian; sector listrik, gas dan air bersih; sector bangunan; serta sector perdagangan, hotel dan restoran.

Sementara sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor pengangkutan dan komunikasi terklasifikasi sebagai sector andalan pada perekonomian Kecamatan Gandrungmangu. Sedangkan beberapa sektor yang lain masih terklasifikasi sebagai sector tertinggal yaitu sektor industri pengolahan; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sector jasa-jasa. Hal tersebut terjadi karena tingkat kontribusinya yang lebih kecil dengan laju pertumbuhan yang lebih

lambat dibandingkan sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap.

Tabel 4.19 Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Gandrungmangu Menurut Daya Saing Tahun 2014-2018

Kriteria	LQ > 1	LQ < 1
DLQ > 1	<u>Sektor Unggulan:</u> Pertanian; Listrik, Gas dan Air Bersih; Perdagangan, Hotel dan Restoran	<u>Sektor Andalan:</u> Bangunan; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
DLQ < 1	<u>Sektor Prospektif:</u> Pertambangan dan Penggalian; Pengangkutan dan Komunikasi	<u>Sektor Tertinggal:</u> Industri Pengolahan; Jasa-Jasa

Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Cilacap 2014-2018, diolah

k. Kecamatan Bantarsari

Sektor-sektor ekonomi Kecamatan Bantarsari terklasifikasi ke dalam sektor unggulan, sektor andalan, sektor prospektif, maupun sektor tertinggal. Dimana ada beberapa sektor yang tumbuh cepat dan ada juga yang tumbuh lebih lambat dibandingkan sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap.

Sektor ekonomi yang terklasifikasi sebagai sektor unggulan dalam perekonomian Kecamatan Bantarsari adalah sektor pertanian. Kemudian yang terklasifikasi sebagai sektor andalan adalah sektor industri pengolahan; dan sektor bangunan. Sedangkan sektor ekonomi yang lain terklasifikasi sebagai sektor prospektif yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor tertinggal yaitu sektor pertambangan dan penggalian; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor

perdagangan, hotel dan restoran; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa.

Tabel 4.20 Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Bantarsari Menurut Daya Saing Tahun 2014-2018

Kriteria	LQ > 1	LQ < 1
DLQ > 1	<u>Sektor Unggulan:</u> Pertanian;	<u>Sektor Andalan:</u> Industri Pengolahan; Bangunan
DLQ < 1	<u>Sektor Prospektif:</u> Pengangkutan dan Komunikasi	<u>Sektor Tertinggal:</u> Pertambangan dan Penggalian; Listrik, Gas dan Air Bersih; Perdagangan, Hotel dan Restoran; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; Jasa-Jasa

Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Cilacap 2014-2018, diolah

1. Kecamatan Kawunganten

Kecamatan Kawunganten diketahui memiliki sektor ekonomi unggulan dan andalan, dimana sektor ekonominya tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor yang sama pada perekonomian Kabupaten Cilacap. Sektor-sektor tersebut yaitu sektor pertanian dan sektor jasa-jasa diklasifikasikan sebagai sektor unggulan. Sementara sektor industri pengolahan diklasifikasikan sebagai sektor andalan.

Adapun sektor listrik, gas dan air bersih dimana memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap namun tumbuh lebih lambat sehingga terklasifikasi ke dalam sektor prospektif. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian; sektor bangunan; sektor perdagangan,

hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebagai sektor tertinggal karena tingkat kontribusinya yang lebih kecil dengan laju pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap.

Tabel 4.21 Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Kawunganten Menurut Daya Saing Tahun 2014-2018

Kriteria	LQ > 1	LQ < 1
DLQ > 1	<u>Sektor Unggulan:</u> Pertanian;Jasa-Jasa	<u>Sektor Andalan:</u> Industri Pengolahan;
DLQ < 1	<u>Sektor Prospektif:</u> Listrik, Gas dan Air Bersih;	<u>Sektor Tertinggal:</u> Pertambangan dan Penggalian;Bangunan; Perdagangan, Hotel dan Restoran;Pengangkutan dan Komunikasi;Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Sumber: BPS,PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Cilacap 2014-2018, diolah

m. Kecamatan Kampung Laut

Sektor-sektor ekonomi Kecamatan Kampung Laut terklasifikasi kedalam sektor unggulan, sektor prospektif, maupun sektor tertinggal. Dimana ada beberapa sektor yang tumbuh cepat dan ada juga yang tumbuh lebih lambat dibandingkan sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap.

Sektor ekonomi yang terklasifikasi sebagai sektor unggulan dalam perekonomian Kecamatan Kampung Laut yaitu sektor pertanian. Kemudian beberapa sektor ekonomi seperti listrik, gas dan air bersih;

perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; maupun jasa-jasa merupakan sektor ekonomi yang teridentifikasi sebagai sektor prospektif. Sedangkan beberapa sektor ekonomi lain seperti sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor bangunan; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan termasuk dalam sektor ekonomi yang tertinggal.

Tabel 4.22 Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Kampung Laut Menurut Daya Saing Tahun 2014-2018

Kriteria	LQ > 1	LQ < 1
DLQ > 1	<u>Sektor Unggulan:</u> Pertanian;	<u>Sektor Andalan:</u> -
DLQ < 1	<u>Sektor Prospektif:</u> Listrik, Gas dan Air Bersih;Perdagangan, Hotel dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi;Jasa-Jasa	<u>Sektor Tertinggal:</u> Pertambangan dan Penggalian;Industri Pengolahan;Bangunan; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Sumber: BPS,PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Cilacap 2014-2018, diolah

n. Kecamatan Jeruklegi

Diketahui dalam perekonomian Kecamatan Jeruklegi terdapat suatu sektor ekonomi yang masuk dalam kategori sektor ekonomi unggulan serta andalan, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan sektor ekonominya yang tumbuh lebih cepat jika dibandingkan dengan sektor yang sama pada perekonomian Kabupaten Cilacap. Sektor ekonomi tersebut diantaranya yaitu sektor pertanian; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor perdagangan, hotel dan restoran; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dimana sektor-sektor tersebut

teridentifikasi ke dalam sektor unggulan. Sedangkan untuk sektor bangunan merupakan sektor andalan di Kecamatan Jeruklegi.

Adapun sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa keduanya memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap namun tumbuh lebih lambat sehingga terklasifikasi ke dalam sektor prospektif. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebagai sektor tertinggal karena tingkat kontribusinya yang lebih kecil dengan laju pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap.

Tabel 4.23 Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Jeruklegi Menurut Daya Saing Tahun 2014-2018

Kriteria	LQ > 1	LQ < 1
DLQ > 1	<u>Sektor Unggulan:</u> Pertanian; Listrik, Gas dan Air Bersih; Perdagangan, Hotel dan Restoran; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	<u>Sektor Andalan:</u> Bangunan;
DLQ < 1	<u>Sektor Prospektif:</u> Industri Pengolahan; Jasa-Jasa	<u>Sektor Tertinggal:</u> Pertambangan dan Penggalian; Pengangkutan dan Komunikasi

Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Cilacap 2014-2018, diolah

o. Kecamatan Kesugihan

Tidak ada satu pun sektor ekonomi di Kecamatan Kesugihan terklasifikasi sebagai sektor prospektif. Ini dikarenakan sektor-sektor ekonomi Kecamatan Kesugihan beberapa tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor yang sama pada perekonomian Kabupaten Cilacap. Termasuk didalamnya sebagai sektor unggulan dalam perekonomian Kecamatan Kesugihan diantaranya yaitu sektor pertambangan dan penggalan; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; dan jasa-jasa.

Sementara sektor listrik, gas dan air bersih; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan terklasifikasi sebagai sektor andalan pada perekonomian Kecamatan Kesugihan. Sedangkan beberapa sektor yang lain masih terklasifikasi sebagai sektor tertinggal yaitu sektor pertanian; sektor industri pengolahan; serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Hal tersebut terjadi karena tingkat kontribusinya yang lebih kecil dengan laju pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap.

Tabel 4.24 Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Kesugihan Menurut Daya Saing Tahun 2014-2018

Kriteria	LQ > 1	LQ < 1
DLQ > 1	<u>Sektor Unggulan:</u> Pertambangan dan Penggalan; Bangunan; Perdagangan, Hotel dan Restoran; Jasa-Jasa	<u>Sektor Andalan:</u> Listrik, Gas dan Air Bersih; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

DLQ < 1	<u>Sektor Prospektif:</u>	<u>Sektor Tertinggal:</u>
-		Pertanian; Industri Pengolahan; Pengangkutan dan Komunikasi

Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Cilacap 2014-2018, diolah

p. Kecamatan Adipala

Tidak ada satu pun sektor ekonomi di Kecamatan Adipala terklasifikasi sebagai sektor prospektif. Ini dikarenakan sektor-sektor ekonomi Kecamatan Adipala beberapa tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor yang sama pada perekonomian Kabupaten Cilacap. Termasuk didalamnya sebagai sektor unggulan dalam perekonomian Kecamatan Adipala adalah sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; serta sektor pengangkutan dan komunikasi.

Sementara sektor pertanian; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan terklasifikasi sebagai sektor andalan pada perekonomian Kecamatan Adipala. Sedangkan beberapa sektor yang lain masih terklasifikasi sebagai sektor tertinggal yaitu sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; serta sektor jasa-jasa. Hal tersebut terjadi karena tingkat kontribusinya yang lebih kecil dengan laju pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap.

Tabel 4.25 Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Adipala Menurut Daya Saing Tahun 2014-2018

Kriteria	LQ > 1	LQ < 1
DLQ > 1	<u>Sektor Unggulan:</u> Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengangkutan dan Komunikasi	<u>Sektor Andalan:</u> Pertanian; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
DLQ < 1	<u>Sektor Prospektif:</u> Pertambangan dan Penggalian; Pengangkutan dan Komunikasi	<u>Sektor Tertinggal:</u> Listrik, Gas dan Air Bersih; Bangunan; Perdagangan, Hotel dan Restoran; Jasa-Jasa

Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Cilacap 2014-2018, diolah

q. Kecamatan Maos

Kecamatan Maos diketahui memiliki sektor ekonomi unggulan dan andalan, dimana sektor ekonominya tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor yang sama pada perekonomian Kabupaten Cilacap. Sektor-sektor tersebut yaitu sektor pertanian; dan sektor bangunan diklasifikasikan sebagai sektor unggulan. Sementara sektor perdagangan, hotel dan restoran diklasifikasikan sebagai sektor andalan.

Adapun sektor jasa-jasa dimana memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap namun tumbuh lebih lambat sehingga terklasifikasi ke dalam sektor prospektif. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, persewaan

dan jasa perusahaan sebagai sektor tertinggal karena tingkat kontribusinya yang lebih kecil dengan laju pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap.

Tabel 4.26 Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Maos Menurut Daya Saing Tahun 2014-2018

Kriteria	LQ > 1	LQ < 1
DLQ > 1	<u>Sektor Unggulan:</u> Pertanian; Bangunan	<u>Sektor Andalan:</u> Perdagangan, Hotel dan Restoran
DLQ < 1	<u>Sektor Prospektif:</u> Jasa-Jasa	<u>Sektor Tertinggal:</u> Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Listrik, Gas dan Air Bersih; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Cilacap 2014-2018, diolah

r. Kecamatan Sampang

Tidak ada satu pun sektor ekonomi di Kecamatan Sampang yang terklasifikasi sebagai sektor prospektif. Ini dikarenakan sektor-sektor ekonomi Kecamatan Sampang beberapa tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor yang sama pada perekonomian Kabupaten Cilacap. Termasuk didalamnya sebagai sektor unggulan dalam perekonomian Kecamatan Sampang adalah sektor pertanian; serta sektor listrik, gas dan air bersih.

Sementara sektor perdagangan, hotel dan restoran; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan terklasifikasi sebagai sektor andalan pada perekonomian Kecamatan Sampang. Sedangkan beberapa sektor yang lain masih terklasifikasi sebagai sektor tertinggal yaitu sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor bangunan; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor jasa-jasa. Hal tersebut terjadi karena tingkat kontribusinya yang lebih kecil dengan laju pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap.

Tabel 4.27 Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Sampang Menurut Daya Saing Tahun 2014-2018

Kriteria	LQ > 1	LQ < 1
DLQ > 1	<u>Sektor Unggulan:</u> Pertanian; Listrik, Gas dan Air Bersih	<u>Sektor Andalan:</u> Perdagangan, Hotel dan Restoran
DLQ < 1	<u>Sektor Prospektif:</u> -	<u>Sektor Tertinggal:</u> Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Bangunan; Pengangkutan dan Komunikasi; Jasa-Jasa

Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Cilacap 2014-2018, diolah

s. Kecamatan Kroya

Tidak ada satu pun sektor ekonomi di Kecamatan Kroya terklasifikasi sebagai sektor prospektif. Ini dikarenakan sektor-sektor ekonomi Kecamatan Kroya beberapa tumbuh lebih cepat dibandingkan

sektor yang sama pada perekonomian Kabupaten Cilacap. Termasuk didalamnya sebagai sektor unggulan dalam perekonomian Kecamatan Kroya adalah sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Sementara sektor pertanian; serta sektor listrik, gas dan air bersih terklasifikasi sebagai sektor andalan pada perekonomian Kecamatan Kroya. Sedangkan beberapa sektor yang lain masih terklasifikasi sebagai sektor tertinggal yaitu sektor pertambangan dan penggalan; sektor industri pengolahan; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor jasa-jasa. Hal tersebut terjadi karena tingkat kontribusinya yang lebih kecil dengan laju pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap.

Tabel 4.28 Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Kroya Menurut Daya Saing Tahun 2014-2018

Kriteria	LQ > 1	LQ < 1
DLQ > 1	<u>Sektor Unggulan:</u> Bangunan; Perdagangan, Hotel dan Restoran; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	<u>Sektor Andalan:</u> Pertanian; Listrik, Gas dan Air Bersih
DLQ < 1	<u>Sektor Prospektif:</u> -	<u>Sektor Tertinggal:</u> Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; Pengangkutan dan Komunikasi; Jasa-Jasa

Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Cilacap 2014-2018, diolah

t. Kecamatan Binangun

Kecamatan Binangun diketahui memiliki sektor ekonomi unggulan dan andalan, dimana sektor ekonominya tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor yang sama pada perekonomian Kabupaten Cilacap. Sektor-sektor tersebut yaitu sektor pertanian; serta sektor perdagangan, hotel dan restoran diklasifikasikan sebagai sektor unggulan. Sementara sektor listrik, gas dan air bersih; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan diklasifikasikan sebagai sektor andalan.

Adapun sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa keduanya memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap namun tumbuh lebih lambat sehingga terklasifikasi ke dalam sektor prospektif. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor bangunan sebagai sektor tertinggal karena tingkat kontribusinya yang lebih kecil dengan laju pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap.

Tabel 4.29 Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Binangun Menurut Daya Saing Tahun 2014-2018

Kriteria	LQ > 1	LQ < 1
DLQ > 1	<u>Sektor Unggulan:</u> Pertanian; Perdagangan, Hotel dan Restoran	<u>Sektor Andalan:</u> Listrik, Gas dan Air Bersih; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
DLQ < 1	<u>Sektor Prospektif:</u> Industri Pengolahan; Jasa-Jasa	<u>Sektor Tertinggal:</u> Pertambangan dan Penggalian; Bangunan

Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Cilacap 2014-2018, diolah

u. Kecamatan Nusawungu

Kecamatan Nusawungu diketahui memiliki sektor ekonomi unggulan dan andalan, dimana sektor ekonominya tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor yang sama pada perekonomian Kabupaten Cilacap. Sektor tersebut yaitu sektor bangunan diklasifikasikan sebagai sektor unggulan. Sementara sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan diklasifikasikan sebagai sektor andalan.

Adapun sektor industri pengolahan dimana memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap namun tumbuh lebih lambat sehingga terklasifikasi ke dalam sektor prospektif. Sedangkan sektor

jasa-jasa sebagai sektor tertinggal karena tingkat kontribusinya yang lebih kecil dengan laju pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap.

Tabel 4.30 Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Nusawungu Menurut Daya Saing Tahun 2014-2018

Kriteria	LQ > 1	LQ < 1
DLQ > 1	<u>Sektor Unggulan:</u> Bangunan	<u>Sektor Andalan:</u> Pertanian; Pertambangan dan Penggalian; Listrik, Gas dan Air Bersih; Perdagangan, Hotel dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
DLQ < 1	<u>Sektor Prospektif:</u> Industri Pengolahan	<u>Sektor Tertinggal:</u> Jasa-Jasa

Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Cilacap 2014-2018, diolah

v. Kecamatan Cilacap Selatan

Kecamatan Cilacap Selatan diketahui memiliki sektor ekonomi unggulan dan andalan, dimana sektor ekonominya tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor yang sama pada perekonomian Kabupaten Cilacap. Sektor-sektor tersebut yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan diklasifikasikan sebagai sektor unggulan. Sementara sektor pertanian; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor jasa-jasa diklasifikasikan sebagai sektor andalan.

Adapun sektor pertambangan dan penggalian; sektor bangunan; serta sektor pengangkutan dan komunikasi ketiganya memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap namun tumbuh lebih lambat sehingga terklasifikasi ke dalam sektor prospektif. Sedangkan sektor industri pengolahan sebagai sektor tertinggal karena tingkat kontribusinya yang lebih kecil dengan laju pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap.

Tabel 4.31 Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Cilacap Selatan Menurut Daya Saing Tahun 2014-2018

Kriteria	LQ > 1	LQ < 1
DLQ > 1	<u>Sektor Unggulan:</u> Perdagangan, Hotel dan Restoran; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	<u>Sektor Andalan:</u> Pertanian; Listrik, Gas dan Air Bersih; Jasa-Jasa
DLQ < 1	<u>Sektor Prospektif:</u> Pertambangan dan Penggalian; Bangunan; Pengangkutan dan Komunikasi	<u>Sektor Tertinggal:</u> Industri Pengolahan

Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Cilacap 2014-2018, diolah

w. Kecamatan Cilacap Tengah

Kecamatan Cilacap Tengah diketahui memiliki sektor ekonomi unggulan dan andalan, dimana sektor ekonominya tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor yang sama pada perekonomian Kabupaten Cilacap. Sektor-sektor tersebut yaitu sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel

dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan diklasifikasikan sebagai sektor unggulan. Sementara sektor pertanian; sektor industri pengolahan; serta sektor listrik, gas dan air bersih diklasifikasikan sebagai sektor andalan.

Adapun sektor pertambangan dan penggalian dimana memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap namun tumbuh lebih lambat sehingga terklasifikasi ke dalam sektor prospektif. Sedangkan sektor jasa-jasa sebagai sektor tertinggal karena tingkat kontribusinya yang lebih kecil dengan laju pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap.

Tabel 4.32 Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Cilacap Tengah Menurut Daya Saing Tahun 2014-2018

Kriteria	LQ > 1	LQ < 1
DLQ > 1	<u>Sektor Unggulan:</u> Bangunan; Perdagangan, Hotel dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	<u>Sektor Andalan:</u> Pertanian; Industri Pengolahan; Listrik, Gas dan Air Bersih
DLQ < 1	<u>Sektor Prospektif:</u> Pertambangan dan Penggalian	<u>Sektor Tertinggal:</u> Jasa-Jasa

Sumber: BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Cilacap 2014-2018, diolah

x. Kecamatan Cilacap Utara

Kecamatan Cilacap Utara diketahui memiliki sektor ekonomi unggulan dan andalan, dimana sektor ekonominya tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor yang sama pada perekonomian Kabupaten Cilacap. Sektor-sektor tersebut yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran; serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan diklasifikasikan sebagai sektor unggulan. Sementara sektor pertanian; serta sektor listrik, gas dan air bersih diklasifikasikan sebagai sektor andalan.

Adapun sektor industri pengolahan dan sektor bangunan keduanya memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap namun tumbuh lebih lambat sehingga terklasifikasi ke dalam sektor prospektif. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor jasa-jasa sebagai sektor tertinggal karena tingkat kontribusinya yang lebih kecil dengan laju pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan sektor yang sama dalam perekonomian Kabupaten Cilacap.

Tabel 4.33 Klasifikasi Sektor Ekonomi Kecamatan Cilacap Utara Menurut Daya Saing Tahun 2014-2018

Kriteria	LQ > 1	LQ < 1
DLQ > 1	<u>Sektor Unggulan:</u> Perdagangan, Hotel dan Restoran; Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	<u>Sektor Andalan:</u> Pertanian; Listrik, Gas dan Air Bersih;

Kriteria	LQ > 1	LQ < 1
DLQ < 1	<u>Sektor Prospektif:</u> Industri Pengolahan; Bangunan	<u>Sektor Tertinggal:</u> Pertambangan dan Penggalian; Pengangkutan dan Komunikasi; Jasa-Jasa

Sumber: BPS,PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Cilacap 2014-2018, diolah

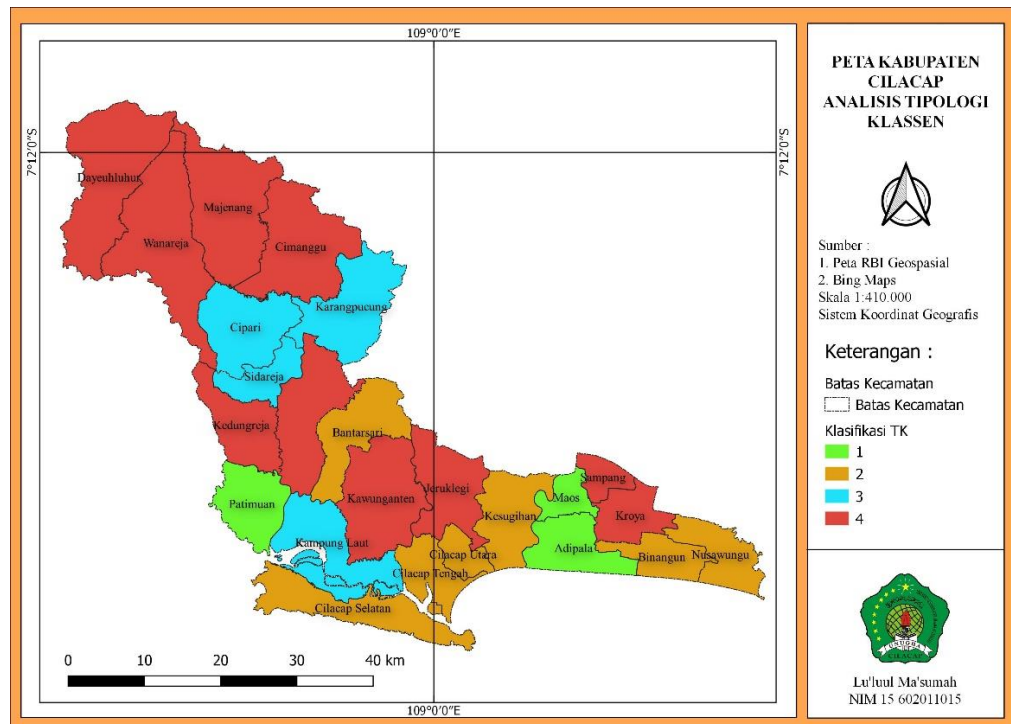
C. Pembahasan

1. Daerah dalam Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) yang Berpotensi Dikembangkan Sebagai PKL di Kabupaten Cilacap

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan suatu kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Berdasarkan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap terkait dengan strategi penataan ruang wilayah yang tertuang dalam Perda Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 yang terdapat pada bagian bab 2 pasal 4 tentang pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang dengan meningkatkan daerah sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) menjadi Pusat Kegiatan Lokal Pengembangan (PKLp), maka dalam penelitian ini akan menganalisis daerah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai PKL di Kabupaten Cilacap berdasarkan tipologi daerahnya.

Berikut hasil analisis tipologi klasen terkait tipologi daerah di masing-masing wilayah/daerah dalam Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) berdasarkan nilai PDRB per kapita, terdapat tiga kecamatan yang termasuk daerah maju dan cepat tumbuh yakni Kecamatan Patimuan (SWP III),

Kecamatan Adipala dan Kecamatan Maos (SWP II). Dimana perekonomian ketiganya tumbuh lebih cepat dengan nilai PDRB per kapita lebih besar dibandingkan kecamatan lain.



Sumber: Data Primer 2020

Gambar 4.2 Peta Tipologi Daerah

Oleh karenanya, dilihat dari posisi perekonomian berdasarkan tipologi daerahnya ketiga daerah yang teridentifikasi sebagai daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh yaitu Kecamatan Patimuan, Kecamatan Maos, dan Kecamatan Adipala merupakan daerah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai PKL di Kabupaten Cilacap. Dimana ketiga daerah tersebut memiliki fasilitas dan sumber daya relatif lebih baik dibandingkan kecamatan lain. Patimuan misalnya, kecamatan ini merupakan kecamatan yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat dimana terdapat suatu kawasan strategis pengembangan ekonomi provinsi yaitu kawasan Pangandaran-

Kalipucang-Segara Anakan-Nusakambangan (Pacangsanak). Selain itu, kecamatan Patimuan juga unggul dalam sektor industri pengolahan terutama dalam industri gula kelapa. Dimana kecamatan Patimuan termasuk salah satu dalam kawasan pesisir sehingga banyak tanaman perkebunan terutama pohon kelapa. Tercatat pada tahun 2018, luas tanaman perkebunan kelapa di kecamatan Patimuan yaitu 1.564Ha dengan produksi kelapa sebanyak 3.464 ton.

Kecamatan Adipala sendiri merupakan salah satu kecamatan yang unggul dalam sektor perindustrian yaitu dengan adanya Kawasan Industri Bunton seluas 450ha. Perekonomian Kecamatan Adipala turut ditunjang oleh keberadaan fasilitas yang cukup lengkap dari mulai fasilitas transportasi seperti terminal bus, fasilitas ekonomi seperti pasar, fasilitas jasa keuangan, dll. Selain itu, di kecamatan Adipala banyak terdapat objek wisata yang menambah daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke daerah tersebut.

Adapun Kecamatan Maos yang unggul dalam sektor pertanian sehingga ditetapkan sebagai lumbung padi bagi provinsi Jawa Tengah. Dimana tercatat pada tahun 2018, luas panen padi di kecamatan Maos yaitu 2.522Ha dengan produksi padi sebanyak 17.085 ton yang tersebar di 10 desa. Selain itu turut ditunjang oleh keberadaan fasilitas yang cukup lengkap yaitu terdapat dua perguruan tinggi Kesehatan dan Kebidanan, adanya pertamina depot Maos, dan stasiun keretaapi Maos.

2. Daya Saing Sektoral dalam Perekonomian antar Kecamatan di Kabupaten Cilacap

Analisis sektoral dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor ekonomi yang dapat dikembangkan dengan melihat daya saing dari sektor ekonomi tersebut. Dimana daya saing sektor ekonomi diklasifikasikan ke dalam sektor unggulan, sektor andalan, sektor prospektif, maupun sektor tertinggal.

Berdasarkan hasil analisis *location quotient* dan analisis *dynamic location quotient* (lampiran 7) menunjukkan bahwa di masing-masing wilayah/daerah dalam Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) memiliki daya saing sektoral yang berbeda – beda. Dimana sektor *i* di wilayah *i* terklasifikasi ke dalam sektor unggulan, namun di wilayah lain terklasifikasi ke dalam sektor andalan, sektor prospektif maupun sektor tertinggal.

Begitu pula dengan ketiga daerah yang teridentifikasi sebagai daerah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Kecamatan Patimuan, Kecamatan Maos, dan Kecamatan Adipala memiliki daya saing sektor perekonomian yang berbeda-beda. Untuk itu, dalam upaya penyelenggaraan perluasan pembangunan ekonomi sub regional secara menyeluruh dan merata perlu diperhatikan terkait sektor ekonomi apa saja yang menjadi prioritas untuk dikembangkan tentunya sesuai dengan karakteristik daerah tersebut. Sehingga nantinya dapat tercipta pembangunan ekonomi yang tepat sasaran dan tepat guna.

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis tipologi klassen keadaan perekonomian masing-masing wilayah dalam Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) dilihat dari tipologi wilayah/daerahnya terdapat tiga wilayah/daerah yang terklasifikasi sebagai wilayah yang maju dan cepat tumbuh yaitu Kecamatan Patimuan (SWP III), Kecamatan Maos dan Kecamatan Adipala (SWP II). Sehingga ketiga daerah tersebut termasuk salah satu daerah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Cilacap.
2. Berdasarkan perbandingan hasil dari analisis *Location Quotient* dan analisis *Dynamic Location Quotient*, diketahui bahwa masing – masing Kecamatan di Kabupaten Cilacap memiliki daya saing sektoral yang berbeda – beda. Dimana setiap Kecamatan memiliki daya saing berupa sektor unggulan, sektor andalan, sektor prospektif, bahkan sektor tertinggal.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Cilacap meningkatkan pembangunan ekonomi terhadap kecamatan lain dengan mengembangkan potensi yang

ada di daerah tersebut, sehingga tidak hanya tiga daerah kecamatan yang terklasifikasi sebagai daerah cepat maju dan tumbuh.

2. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Cilacap menggerakkan perekonomian sektoral dengan memperhatikan daya saing masing-masing sektor ekonomi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

C. Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan selama pelaksanaan penelitian skripsi dengan judul **“ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN DAN DAYA SAING SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN (SWP) SEBAGAI PUSAT KEGIATAN LOKAL (PKL) KABUPATEN CILACAP”**. Diharapkan dari keterbatasan ini, mampu membangun pola pikir pembaca untuk memperbaiki dan melanjutkan penelitian ini secara mendalam baik secara teoritis maupun praktis sehingga dapat di aplikasikan dan bermanfaat untuk kemajuan perekonomian Kabupaten Cilacap.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, H. Rahardjo. (2005). *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: GRAHA ILMU
- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan* (Edisi kelima). Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Ariastuti, Indah Dwi. (2014). *Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Purbalingga Dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB Periode 2007-2011*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Badan Pusat Statistik. (2019). Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2019. BPS: penulis. Diakses dari <https://jateng.bps.go.id/publication/2019/08/16/fcb9efa7796cdbc491325688/provinsi-jawa-tengah-dalam-angka-2019.html>
- Badan Pusat Statistik. (2019). Kabupaten Cilacap Dalam Angka 2019 (33010. 1902). BPS: penulis. Diakses dari <https://cilacapkab.bps.go.id/publication/2019/08/16/51f604683beb81c4622a1fba/kabupaten-cilacap-dalam-angka-2019.html>
- _____. (2019). PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Cilacap 2014-2018 (33010. 1901). BPS: penulis. Diakses dari <https://cilacapkab.bps.go.id/publication/2019/08/16/2b7e380460d27f9eca45007/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-cilacap-menurut-lapangan-usaha-2014-2018.html>
- _____. (2019). Kecamatan Adipala Dalam Angka 2019. BPS: penulis. Diakses dari <https://cilacapkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/9c77025b90b8d5d8fe68ca46/kecamatan-adipala-dalam-angka-2019.html>
- _____. (2019). Kecamatan Majenang Dalam Angka 2019. BPS: penulis. Diakses dari <https://cilacapkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/f0cc6351a81114b9611cfe47/kecamatan-majenang-dalam-angka-2019.html>
- _____. (2019). Kecamatan Maos Dalam Angka 2019. BPS: penulis. Diakses dari <https://cilacapkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/d28936fa7c06cf37f7d938fa/kecamatan-maos-dalam-angka-2019.html>

- _____. (2019). Kecamatan Cilacap Selatan Dalam Angka 2019. BPS: penulis. Diakses dari <https://cilapkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/ce3482740b2818f838680ed3/kecamatan-cilacap-selatan-dalam-angka-2019.html>
- _____. (2019). Kecamatan Bantarsari Dalam Angka 2019. BPS: penulis. Diakses dari <https://cilapkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/c2a87601e9192311723bae30/kecamatan-bantarsari-dalam-angka-2019.html>
- _____. (2019). Kecamatan Kedungreja Dalam Angka 2019. BPS: penulis. Diakses dari <https://cilapkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/ab5017889f46f3f6824533f8/kecamatan-kedungreja-dalam-angka-2019.html>
- _____. (2019). Kecamatan Cilacap Utara Dalam Angka 2019. BPS: penulis. Diakses dari <https://cilapkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/a17d9f375f8929bd4d3025d6/kecamatan-cilacap-utara-dalam-angka-2019.html>
- _____. (2019). Kecamatan Patimuan Dalam Angka 2019. BPS: penulis. Diakses dari <https://cilapkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/9667f2a5a5075df12c3b6ce2/kecamatan-patimuan-dalam-angka-2019.html>
- _____. (2019). Kecamatan Kroya Dalam Angka 2019. BPS: penulis. Diakses dari <https://cilapkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/961f1a868bac4d5d4358d838/kecamatan-kroya-dalam-angka-2019.html>
- _____. (2019). Kecamatan Binangun Dalam Angka 2019. BPS: penulis. Diakses dari <https://cilapkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/9002a95e7d2afaf01aae8933/kecamatan-binangun-dalam-angka-2019.html>
- _____. (2019). Kecamatan Gandrung mangu Dalam Angka 2019. BPS: penulis. Diakses dari <https://cilapkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/8e8ff4c0af1a37a242cfc677/kecamatan-gandrungmangu-dalam-angka-2019.html>
- _____. (2019). Kecamatan Sidareja Dalam Angka 2019. BPS: penulis. Diakses dari <https://cilapkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/8cc9a5ea170ef5b7d832ef19/kecamatan-sidareja-dalam-angka-2019.html>

- _____. (2019). Kecamatan Cipari Dalam Angka 2019. BPS: penulis.
Diakses _____ dari
<https://cilacapkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/8b4709d4755a416ac6d8d5b2/kecamatan-cipari-dalam-angka-2019.html>
- _____. (2019). Kecamatan Karangpucung Dalam Angka 2019. BPS:
penulis. Diakses _____ dari
<https://cilacapkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/85405885bca79b676ba934f9/kecamatan-karangpucung-dalam-angka-2019.html>
- _____. (2019). Kecamatan Sampang Dalam Angka 2019. BPS: penulis.
Diakses _____ dari
<https://cilacapkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/7e692a44163a263eafdfe383/kecamatan-sampang-dalam-angka-2019.html>
- _____. (2019). Kecamatan Kesugihan Dalam Angka 2019. BPS: penulis.
Diakses _____ dari
<https://cilacapkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/7e5b05f83187fd297a10edc5/kecamatan-kesugihan-dalam-angka-2019.html>
- _____. (2019). Kecamatan Kawunganten Dalam Angka 2019. BPS:
penulis. Diakses _____ dari
<https://cilacapkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/7b14e1d12758cd22c1b195d9/kecamatan-kawunganten-dalam-angka-2019.html>
- _____. (2019). Kecamatan Cilacap Tengah Dalam Angka 2019. BPS:
penulis. Diakses _____ dari
<https://cilacapkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/655c7c81ebe33e8ebbb375ba/kecamatan-cilacap-tengah-dalam-angka-2019.html>
- _____. (2019). Kecamatan Wanareja Dalam Angka 2019. BPS: penulis.
Diakses _____ dari
<https://cilacapkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/5b049bebfc4e821a055c926a/kecamatan-wanareja-dalam-angka-2019.html>
- _____. (2019). Kecamatan Cimanggu Dalam Angka 2019. BPS: penulis.
Diakses _____ dari
<https://cilacapkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/41d848cb9b8934ccff37d64/kecamatan-cimanggu-dalam-angka-2019.html>
- _____. (2019). Kecamatan Jeruklegi Dalam Angka 2019. BPS: penulis.
Diakses _____ dari
<https://cilacapkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/40b856a2a735ba70053ed4a4/kecamatan-jeruklegi-dalam-angka-2019.html>

- _____. (2019). Kecamatan Nusawungu Dalam Angka 2019. BPS: penulis. Diakses dari <https://cilacapkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/3f34dbfbff762e37b8ddd9ee/kecamatan-nusawungu-dalam-angka-2019.html>
- _____. (2019). Kecamatan Kampung Laut Dalam Angka 2019. BPS: penulis. Diakses dari <https://cilacapkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/30ab360dadfed1d6956c3f95/kecamatan-kampung-laut-dalam-angka-2019.html>
- _____. (2019). Kecamatan Dayeuluhur Dalam Angka 2019. BPS: penulis. Diakses dari <https://cilacapkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/02d05d8c6ae87e5bbe8ab40d/kecamatan-dayeuhluhur-dalam-angka-2019.html>
- Emalia, Zulfa dan Isti Farida.(2018). *Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Interaksi Spasial Di Provinsi Lampung*.Jurnal. Lampung: Universitas Lampung
- Fauzi, Achmad. (2016). *Analisis Spasial dan Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian di Wilayah Kabupaten Cilacap*.Tesis. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman
- Pramono, R.Widodo Dwi dan Ratna Eka Suminar. (2019). *Ekonomi Wilayah Untuk Perencanaan Tata Ruang*. Yogyakarta: DEEPUBLISH
- Sukirno, Sadono. (2006). *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* (edisi kedua). Jakarta: Kencana
- Sampurna, Jaya. (2013). *Analisis Aspek Spasial, Struktural dan Sektoral Perekonomian Kecamatan Serta Implikasinya Terhadap Perluasan Pembangunan Kabupaten Brebes*. Tesis. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman
- Tarigan, Drs. Robinson. (2005). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi* (edisi revisi). Jakarta: PT Bumi Aksara

LAMPIRAN